

Studi Komparatif Kaderisasi dan Pemenangan Pemilu Legislatif tahun 2024, Studi Kasus : Relevansi Peningkatan Jumlah Kader dengan Penambahan Jumlah Suara Dalam Pemilu Legislatif DPD PKS Se - Bandung Raya (DPD PKS Kota Cimahi, DPD PKS Kota Bandung, DPD PKS Kabupaten Bandung, DPD PKS Kabupaten Bandung Barat)

Naufal Maulana Sopian¹, Subagyo Sri Utomo²

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Bisnis, Universitas Wanita Internasional

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oktober 2026

Revised Oktober 2026

Accepted Oktober 2026

Available Oktober 2026

naulanas8@gmail.com¹

subagyo@iwu.ac.id²

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif efektivitas kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan relevansinya terhadap kemenangan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) Tahun 2024 di wilayah Bandung Raya, yang meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus komparatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 12 informan kunci serta studi dokumentasi data kepartaian dan hasil Pileg 2019 dan 2024. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan model Miles dan Huberman, dengan triangulasi sumber dan teknik untuk menjaga keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kaderisasi PKS berbeda di setiap wilayah, yang tercermin dari variasi rasio konversi Kartu Tanda Anggota (KTA) menjadi kader terbina. Peningkatan jumlah kader memiliki relevansi terhadap peningkatan perolehan suara, tetapi hubungannya bersifat kondisional dan tidak selalu linear.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keaktifan kader, mekanisme konversi suara menjadi kursi melalui metode Sainte-Laguë, perubahan daerah pemilihan, praktik politik uang, figuritas calon legislatif, serta tipologi pemilih di masing-masing wilayah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kaderisasi merupakan syarat perlu, tetapi bukan syarat yang cukup bagi keberhasilan kemenangan pemilu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kualitas pembinaan kader, pemerataan distribusi kader dan tenaga pembina, serta strategi elektoral yang adaptif terhadap konteks sosial-politik lokal.

Kata kunci: Kaderisasi, Pemenangan Pemilu, Partai Keadilan Sejahtera, Studi Komparatif.

A B S T R A C T

This study aims to comparatively analyze the effectiveness of cadre development within the Prosperous Justice Party (Partai Keadilan Sejahtera/PKS) and its relevance to electoral success in the 2024 Legislative Election across the Greater Bandung Region, encompassing Bandung City, Cimahi City, Bandung Regency, and West Bandung Regency. This research employed a descriptive qualitative method with a comparative case study approach. Data were collected through in-depth interviews with 12 key informants and documentary studies of party records and the 2019 and 2024 legislative election results. Data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing based on the Miles and Huberman model, while source and method triangulation were used to ensure data trustworthiness. The findings reveal that the effectiveness of PKS cadre development varies across the four regions, as reflected in differences in the conversion ratio of membership card (KTA) holders into trained cadres. An increase in the

number of cadres is relevant to vote gains; however, the relationship is conditional rather than linear. This condition is influenced by cadre activity, the Sainte-Laguë method of converting votes into seats, changes in electoral district configurations, money politics, legislative candidates' personal appeal, and voter typologies in each region. The study concludes that cadre development is a necessary but insufficient condition for electoral success. Therefore, strengthening the quality of cadre development, ensuring a more equitable distribution of cadres and mentors, and adopting electoral strategies that are responsive to local socio-political contexts are essential.

Keywords: *Cadre Development, Election Winning, Prosperous Justice Party, Comparative Study.*

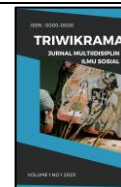
1. PENDAHULUAN

Partai politik merupakan institusi utama dalam kehidupan demokrasi karena memainkan peran strategis sebagai perantara antara masyarakat dan negara, penyampai aspirasi, serta pengembang kepemimpinan politik. Fungsi partai politik tidak hanya sebagai peserta kontestasi elektoral, tetapi juga sebagai lembaga yang melakukan kaderisasi, yaitu proses pembinaan sumber daya manusia untuk menjadi aktor politik yang kompeten, berintegritas, serta memiliki kapasitas ideologis dan organisatoris. Kaderisasi merupakan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk mencetak kader yang mampu berkontribusi dalam pengambilan keputusan, kemenangan pemilu, serta pelaksanaan pemerintahan. Dalam konteks Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) Tahun 2024, efektivitas kaderisasi menjadi salah satu aspek penting untuk melihat kesiapan organisasi partai dalam meningkatkan kualitas kader, menggerakkan basis massa, dan membangun komunikasi politik yang efektif di tengah masyarakat.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan salah satu partai politik di Indonesia yang menempatkan kaderisasi sebagai pilar utama strategi organisasinya. PKS dikenal memiliki sistem kaderisasi yang terstruktur dan berjenjang dengan tujuan meningkatkan kapasitas ideologis, organisatoris, dan elektoral kader. Namun, keseragaman sistem kaderisasi tidak selalu menghasilkan capaian elektoral yang sama di setiap daerah. Kondisi tersebut terlihat di wilayah Bandung Raya yang meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Keempat wilayah ini memiliki dinamika sosial-politik yang kompleks dan persaingan antarpolisi yang ketat, tetapi menunjukkan perbedaan hasil perolehan suara PKS pada Pemilu Legislatif Tahun 2024. Fenomena tersebut menjadi dasar penting untuk mengkaji relevansi peningkatan jumlah kader terhadap keberhasilan kemenangan pemilu di tingkat daerah.

Dalam menganalisis hubungan antara kaderisasi dan kemenangan pemilu, terdapat perbedaan penting antara anggota yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) dan kader yang telah terbina. Kader ber-KTA merupakan anggota yang terdaftar secara administratif dalam basis data keanggotaan partai, tetapi belum tentu mengikuti pembinaan ideologis dan keorganisasian secara rutin dan berjenjang. Sementara itu, kader terbina merupakan anggota yang secara aktif mengikuti forum pembinaan liqo atau halaqah dalam kerangka **manhaj tarbiyah** PKS, sehingga memiliki pemahaman ideologis, militansi, serta keterikatan organisatoris yang lebih kuat. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa besarnya jumlah anggota yang terdaftar tidak serta-merta mencerminkan kekuatan riil partai di lapangan. Jumlah kader terbina menjadi aspek penting karena lebih menggambarkan kapasitas mobilisasi dan militansi anggota yang dapat dikerahkan dalam kegiatan kemenangan pemilu.

Perbedaan karakteristik sosial-politik di setiap wilayah Bandung Raya turut memberikan konteks dalam memahami variasi hasil elektoral PKS. Kota Bandung sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas politik memiliki karakteristik pemilih yang heterogen, tingkat pendidikan dan akses informasi yang relatif tinggi, serta penggunaan media digital yang berkembang. Pemilih di wilayah ini cenderung kritis terhadap berbagai isu publik, seperti tata kota, transportasi, ekonomi kreatif, pendidikan, dan pelayanan publik. Basis dukungan PKS selama ini banyak ditopang oleh kalangan kelas menengah perkotaan, komunitas pendidikan, jaringan masjid, serta kelompok profesional muda. Meskipun suara PKS relatif stabil pada Pemilu 2024, peningkatannya yang terbatas menunjukkan adanya tantangan dalam memperluas jangkauan kepada pemilih baru. Selain



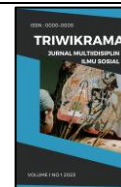
kekuatan organisasi, figur calon legislatif yang berasal dari kalangan tokoh masyarakat, akademisi, pengusaha, maupun aktivis sosial juga memiliki peran dalam menarik dukungan pemilih.

Berbeda dengan Kota Bandung, Kota Cimahi merupakan kota penyangga metropolitan yang memiliki karakteristik masyarakat urban, keluarga muda, pegawai swasta, aparatur sipil negara, serta komunitas militer. Ikatan sosial dan hubungan interpersonal yang relatif dekat menjadi salah satu karakteristik masyarakat di wilayah ini. Perolehan suara PKS meningkat dari 53.909 suara pada Pemilu 2019 menjadi 70.988 suara pada Pemilu 2024. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya perkembangan dukungan elektoral yang dapat berkaitan dengan efektivitas kaderisasi, penguatan struktur partai hingga tingkat ranting, serta keberhasilan kader dalam membangun hubungan sosial yang berkelanjutan dengan masyarakat. Kedekatan personal dan aktivitas sosial calon legislatif menjadi aspek penting karena masyarakat cenderung memberikan dukungan kepada figur yang dikenal melalui kegiatan kemasyarakatan, keagamaan, maupun pelayanan publik.

Sementara itu, Kabupaten Bandung memiliki wilayah yang luas dengan karakteristik masyarakat yang heterogen, mencakup kawasan perkotaan, semi-perkotaan, industri, dan pedesaan. Perbedaan kondisi sosial tersebut menyebabkan orientasi politik masyarakat tidak selalu sama. Pada Pemilu 2024, perolehan suara PKS di Kabupaten Bandung mengalami penurunan dari 273.111 suara pada tahun 2019 menjadi 254.887 suara. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan basis dukungan di tengah persaingan antarpolisi yang semakin ketat. Keberadaan partai dengan figur lokal yang kuat dan jaringan patronase di tingkat desa turut menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Selain itu, tokoh agama, kepala desa, mantan pejabat daerah, pengusaha lokal, dan tokoh komunitas memiliki potensi mobilisasi suara yang besar. Dengan demikian, keberhasilan kemenangan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan organisasi, tetapi juga oleh kemampuan partai menghadirkan calon legislatif yang memiliki pengaruh sosial di tingkat lokal.

Kabupaten Bandung Barat menunjukkan dinamika yang berbeda dengan peningkatan perolehan suara PKS dari 126.661 suara pada Pemilu 2019 menjadi 158.710 suara pada Pemilu 2024. Struktur sosial masyarakat yang masih didominasi karakter pedesaan, komunitas lokal yang kuat, serta hubungan sosial berbasis keluarga dan tokoh masyarakat menjadi konteks penting dalam memahami perkembangan tersebut. Peningkatan suara dapat dikaitkan dengan efektivitas jaringan kader di tingkat kecamatan dan desa, penguatan aktivitas sosial kemasyarakatan, serta meningkatnya penerimaan masyarakat terhadap figur-figur PKS di tingkat lokal. Karakteristik pemilih yang responsif terhadap pendekatan langsung atau **face-to-face politics**, aktivitas sosial, dan kehadiran tokoh yang dekat dengan masyarakat memberikan ruang bagi kader aktif untuk memperluas dukungan politik partai.

Berdasarkan data hasil Pemilu Legislatif 2019 dan 2024, perolehan suara PKS di empat wilayah Bandung Raya memperlihatkan variasi yang cukup jelas. Kota Bandung mengalami peningkatan tipis dari 295.615 suara menjadi 297.937 suara, sedangkan Kota Cimahi meningkat dari 53.909 suara menjadi 70.988 suara. Sebaliknya, Kabupaten Bandung mengalami penurunan dari 273.111 suara menjadi 254.887 suara, sementara Kabupaten Bandung Barat mengalami peningkatan dari 126.661 suara menjadi 158.710 suara. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa ideologi, sistem kaderisasi, dan struktur organisasi yang relatif seragam tidak selalu menghasilkan capaian elektoral yang sama. Variasi hasil tersebut mengindikasikan adanya pengaruh karakteristik sosial masyarakat, kekuatan kaderisasi di tingkat daerah, efektivitas mobilisasi politik, figuritas calon legislatif, serta dinamika persaingan antarpolisi



Selain faktor organisasi dan kaderisasi, figuritas calon legislatif merupakan aspek penting dalam menjelaskan perbedaan perolehan suara PKS di setiap daerah. Sistem proporsional terbuka memungkinkan pemilih tidak hanya mempertimbangkan partai politik, tetapi juga individu calon legislatif. Kedekatan personal, aktivitas sosial, reputasi, dan pengaruh sosial calon dapat menjadi faktor yang meningkatkan ataupun menghambat perolehan suara partai. Keberadaan calon petahana, tokoh agama, pengusaha, aktivis organisasi masyarakat, pimpinan komunitas, maupun tokoh media sosial dapat memberikan kontribusi suara yang signifikan. Sebaliknya, wilayah yang tidak memiliki calon dengan daya tarik sosial yang kuat cenderung lebih bergantung pada kekuatan struktur partai dan militansi kader. Oleh karena itu, keberhasilan elektoral perlu dipahami melalui keterkaitan antara kapasitas kaderisasi, strategi pemenangan, kekuatan figur calon, dan kondisi sosial-politik masyarakat setempat.

Fenomena perbedaan capaian elektoral PKS di Bandung Raya juga terlihat dari perubahan jumlah kursi legislatif. Kota Cimahi berhasil meningkatkan jumlah kursi DPRD dari tujuh menjadi sembilan kursi, sedangkan Kota Bandung mengalami kehilangan dua kursi meskipun perolehan suaranya meningkat tipis. Kabupaten Bandung belum berhasil menjadi pemenang Pileg di wilayahnya, sementara Kabupaten Bandung Barat menunjukkan capaian elektoral yang positif. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan suara tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan jumlah kursi legislatif. Hasil kemenangan juga berkaitan dengan mekanisme konversi suara menjadi kursi melalui metode Sainte-Laguë, perubahan konfigurasi daerah pemilihan, serta dinamika persaingan dan karakteristik pemilih di setiap wilayah.

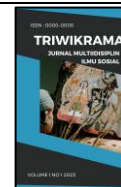
Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini berfokus pada studi komparatif efektivitas kaderisasi dan kemenangan Pemilu Legislatif Tahun 2024 pada Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kaderisasi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas kader, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi strategi serta kinerja tim kemenangan, dan menjelaskan relevansi peningkatan jumlah serta kualitas kader terhadap peningkatan perolehan suara di masing-masing wilayah. Perbandingan keempat daerah tersebut menjadi penting karena berada dalam satu kawasan geografis dan memiliki sistem kaderisasi partai yang relatif seragam, tetapi menunjukkan hasil elektoral yang berbeda.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian ilmu politik, khususnya mengenai hubungan antara kaderisasi, strategi kemenangan, dan hasil elektoral pada tingkat daerah. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi penguatan organisasi partai politik, terutama dalam meningkatkan kualitas pembinaan kader, memperluas jangkauan mobilisasi politik, serta menyusun strategi kemenangan yang lebih adaptif terhadap karakteristik sosial-politik di setiap daerah. Melalui pendekatan komparatif, penelitian ini tidak hanya melihat perbedaan capaian suara dan kursi, tetapi juga berupaya menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan tersebut, sehingga relevansi kaderisasi terhadap keberhasilan kemenangan Pemilu Legislatif Tahun 2024 dapat dipahami secara lebih komprehensif.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Penelitian Ridho Al Hamdi (2022) membahas ketahanan organisasi dan strategi kampanye PKS pada Pemilu 2014 dan 2019 menggunakan teori institusionalisasi partai serta political marketing mix. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKS memiliki pelembagaan organisasi yang kuat melalui kepemimpinan prosedural, kaderisasi sistematis, dan komitmen ideologis. Unsur



produk politik dan jaringan kader juga berperan penting dalam peningkatan suara. Namun, penyelesaian konflik internal masih menjadi salah satu kelemahan organisasi.

Penelitian Rosma Mayar dan M. F. Adnan (2024) membahas peran PKS dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024 di Kota Padang melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKS menjalankan pendidikan politik, sosialisasi program, kampanye, rekrutmen anggota, serta pemanfaatan media daring dan luring. Keberhasilan tersebut didukung oleh militansi kader, kekuatan organisasi, dan kemampuan membangun hubungan dengan masyarakat.

Kedua penelitian sama-sama membahas PKS dan menekankan pentingnya kaderisasi, kekuatan organisasi, serta strategi politik. Perbedaannya, Ridho Al Hamdi (2022) berfokus pada pelembagaan organisasi dan strategi kampanye, sedangkan Rosma Mayar dan M. F. Adnan (2024) berfokus pada peningkatan partisipasi masyarakat. Keduanya menjadi landasan untuk mengkaji hubungan kaderisasi dengan perolehan suara dan kursi legislatif. Penelitian terdahulu belum secara mendalam membandingkan hubungan antara jumlah dan kualitas kader dengan capaian elektoral PKS di berbagai wilayah. Kaderisasi, strategi kampanye, dan perilaku pemilih cenderung dibahas secara terpisah. Oleh karena itu, diperlukan kajian komparatif yang mempertimbangkan efektivitas kaderisasi, strategi kemenangan, serta dinamika sosial-politik lokal.

Pembaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif kaderisasi dan kemenangan Pileg 2024 di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Penelitian tidak hanya menilai peningkatan jumlah kader, tetapi juga memperhatikan kualitas pembinaan, keaktifan kader, strategi kemenangan, karakteristik pemilih, dan persaingan politik untuk menjelaskan perbedaan hasil elektoral PKS.

Kerangka Teoritis

Grand Theory

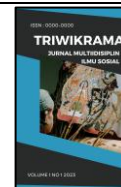
Grand theory meliputi teori partai politik, kaderisasi, pelembagaan partai, organisasi, dan demokrasi representatif sebagai dasar untuk memahami pembentukan kader dan pencapaian tujuan politik.

Teori Partai Politik

Menurut Miriam Budiardjo (2008), partai politik merupakan organisasi yang bertujuan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan melalui cara konstitusional. Partai memiliki fungsi rekrutmen politik, pendidikan politik, serta artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat. Dalam penelitian ini, kaderisasi menjadi bagian penting dari fungsi tersebut karena menentukan kemampuan partai menyiapkan kader yang kompeten dan mendukung kemenangan pemilu.

Kaderisasi Partai Politik

Kaderisasi merupakan proses perekrutan, pendidikan, dan pembinaan anggota untuk membentuk kader yang memiliki kesadaran ideologis, kemampuan organisasi, serta keterampilan kepemimpinan. Sartori (1976) menekankan pentingnya reproduksi elite melalui kaderisasi terstruktur, sedangkan Kartini Kartono (2009) memandang kaderisasi sebagai pendidikan politik yang sistematis. Almond dan Powell (1966) menempatkan kaderisasi sebagai bagian dari political recruitment. Randall dan Svåsand (2002) menekankan dimensi ideologis, organisatoris, dan elektoral, sementara Mair (1997) serta Verba, Scholzman, dan Brady (1995) menegaskan pentingnya kedekatan kader dengan masyarakat dan kemampuan organisasi dalam mendukung partisipasi politik. Dengan demikian, kaderisasi tidak hanya berorientasi pada jumlah anggota, tetapi juga kualitas dan kemampuan elektoralnya.



Teori Pelembagaan Partai (*Party Institutionalization Theory*)

Randall dan Svasand (2002) menjelaskan bahwa pelembagaan partai mencakup stabilitas organisasi, keberlanjutan kaderisasi, loyalitas kader, dan struktur yang terorganisasi. Dalam konteks PKS, sistem tarbiyah menjadi instrumen pembinaan untuk memperkuat identitas dan kesinambungan organisasi. Perbedaan pelaksanaannya antardaerah dapat membantu menjelaskan variasi capaian elektoral.

Teori Organisasi (*Organizational Theory*)

Teori organisasi memandang kader sebagai sumber daya strategis, kaderisasi sebagai proses pengembangan sumber daya manusia, dan pemilu sebagai keluaran organisasi. Keberhasilan ditentukan oleh kualitas kader, struktur, pembinaan, serta koordinasi. Oleh karena itu, jumlah kader perlu diikuti pengelolaan yang efektif agar dapat mendukung kemenangan.

Teori Demokrasi Representatif

Teori demokrasi representatif menempatkan partai politik sebagai sarana memperoleh dukungan masyarakat dan menempatkan wakil di lembaga legislatif. Kaderisasi diperlukan untuk menyiapkan kandidat yang kompeten, berintegritas, dan mampu memahami kepentingan masyarakat. Kualitas kandidat dan kedekatan dengan pemilih menjadi aspek penting dalam kemenangan Pileg.

Middle Range Theory

Teori Rekrutmen Politik (*Political Recruitment Theory*)

Teori rekrutmen politik menjelaskan proses perekrutan anggota, pembinaan ideologi dan kapasitas kader, serta penyiapan calon legislatif. Rekrutmen tidak hanya menekankan jumlah anggota, tetapi juga kualitasnya. Dalam PKS, BKAP berperan dalam rekrutmen dan pembinaan kader yang mendukung kapasitas organisasi.

Teori Perilaku Pemilih (*Voting Behavior Theory*)

Teori perilaku pemilih menjelaskan bahwa pilihan masyarakat dipengaruhi identifikasi partai, kedekatan dengan kandidat, aktivitas kader, dan persepsi terhadap kinerja partai. Kader yang aktif dapat membangun kepercayaan dan memperluas jangkauan dukungan, meskipun hasilnya tetap dipengaruhi karakteristik masyarakat dan persaingan politik.

Teori Mobilisasi Politik (*Political Mobilization Theory*)

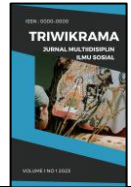
Teori mobilisasi politik menjelaskan upaya partai menggerakkan sumber daya untuk memperoleh dukungan. Kader berperan dalam kampanye, kegiatan door to door, dan aktivitas sosial. Dalam penelitian ini, BP3 berperan strategis dalam mengelola kemenangan, sedangkan perbedaan strategi mobilisasi dapat memengaruhi hasil elektoral setiap DPD.

Teori Jaringan Sosial (*Social Network Theory*)

Teori jaringan sosial menjelaskan bahwa hubungan antarindividu membantu penyebaran informasi dan pengaruh politik. Kader menjadi penghubung antara partai dan masyarakat melalui komunitas serta kegiatan sosial. Jaringan yang luas dapat memperbesar peluang penyampaian program dan mobilisasi dukungan pemilih.

Teori Kinerja Organisasi Politik (*Political Organizational Performance*)

Teori ini melihat organisasi melalui tiga unsur, yaitu input berupa jumlah dan kualitas kader, process berupa kaderisasi dan strategi kampanye, serta output berupa perolehan suara dan



kursi. Kinerja elektoral bergantung pada kemampuan partai mengelola sumber daya secara efektif, bukan sekadar besarnya jumlah anggota.

Teori Peran (*Role Theory*)

Teori peran menjelaskan pembagian tugas dalam organisasi. Ketua DPD bertanggung jawab terhadap kebijakan strategis, Ketua BKAP mengelola kaderisasi, sedangkan Ketua BP3 mengelola kemenangan pemilu. Pelaksanaan peran dan koordinasi yang efektif dapat mendukung keberhasilan organisasi.

Sintesis *Middle Range Theory* dalam Penelitian

Rekrutmen menghasilkan anggota baru, kaderisasi meningkatkan kualitas dan loyalitas, jaringan sosial memperluas pengaruh, sedangkan mobilisasi politik mengarahkan sumber daya untuk memperoleh dukungan. Keseluruhan proses tersebut berkontribusi terhadap kinerja organisasi dan hasil elektoral. Namun, keberhasilannya tetap dipengaruhi strategi kemenangan dan kondisi sosial-politik lokal.

Applied Theory

Manhaj Tarbiyah sebagai Sistem dan Konsep Kaderisasi PKS

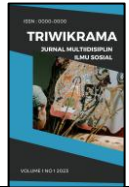
Manhaj tarbiyah merupakan sistem pembinaan kader PKS yang terstruktur, berjenjang, dan berkelanjutan dalam aspek ideologis, moral, intelektual, serta organisatoris. Hasan Al-Banna (2001) menekankan pembentukan individu yang memiliki kesadaran ideologis dan disiplin organisasi, sedangkan Nurhaidi Hasan (2010) menjelaskan tarbiyah sebagai instrumen untuk menjaga konsistensi ideologi dan kohesi organisasi PKS. Pembinaan dilakukan secara berjenjang dan rutin melalui halaqah atau liqo. Duverger (1954) menekankan kualitas serta loyalitas anggota dalam partai kader, sementara Randall dan Svåsand (2002) menegaskan pentingnya konsistensi internal. Norris (2000) juga menyoroti peran jaringan kader lokal dalam keberhasilan pemilu. Dengan demikian, tarbiyah berfungsi sebagai pembinaan ideologis sekaligus penguatan kapasitas elektoral.

Pemenangan Pemilihan Umum Legislatif (PILEG)

Pemenangan Pileg merupakan upaya partai memperoleh suara dan kursi legislatif melalui organisasi, kandidat, dan strategi politik. Downs (1957) menjelaskan bahwa partai menyesuaikan strategi dengan preferensi pemilih, sedangkan Sartori (1976) menekankan kekuatan organisasi dan strategi kompetisi. Norris (2000) menyoroti mobilisasi akar rumput, Cox (1997) menjelaskan pengaruh persaingan daerah pemilihan, dan Aspinall serta Sukmajati (2015) menekankan pentingnya figur dan kedekatan personal kandidat. Dengan demikian, kemenangan Pileg dipengaruhi kualitas kader, strategi kampanye, kekuatan kandidat, dan kondisi sosial-politik lokal.

Teori Partai Politik

Sartori (1976) menjelaskan bahwa partai politik berfungsi mengartikulasikan kepentingan, merekrut elite, dan berkompetisi dalam pemilu. Duverger (1954) membedakan partai kader yang mengutamakan kualitas dan loyalitas dengan partai massa yang menekankan jumlah anggota serta mobilisasi luas. PKS dapat dipahami sebagai partai kader karena menempatkan pembinaan anggota secara berjenjang sebagai salah satu fondasi organisasinya.



Teori Kaderisasi dan Rekrutmen Politik

Almond dan Powell (1966) menempatkan kaderisasi sebagai proses pengisian peran politik, sedangkan Kartini Kartono (2009) menekankan pendidikan politik untuk membentuk kesadaran ideologis dan keterampilan kepemimpinan. Randall dan Svåsand (2002) mengaitkan kaderisasi dengan pelembagaan partai. Dalam Pileg, kaderisasi berfungsi menyiapkan calon legislatif dan jaringan pendukung yang mampu memobilisasi pemilih.

Teori Pemenangan Pemilihan Umum Legislatif

Downs (1957) menekankan penyesuaian strategi terhadap preferensi pemilih, Cox (1997) menjelaskan pengaruh sistem pemilu dan koordinasi di daerah pemilihan, sedangkan Norris (2000) menyoroti pentingnya jaringan lokal. Teori ini menunjukkan bahwa keberhasilan Pileg tidak hanya ditentukan jumlah kader, tetapi juga strategi kampanye, kekuatan kandidat, dan kemampuan mobilisasi.

Hubungan Kaderisasi dan Pemenangan Pileg

Kaderisasi menyediakan sumber daya manusia untuk menjalankan strategi elektoral. Kader yang berkualitas dan aktif dapat memperluas jaringan sosial, menyampaikan program, serta menggerakkan dukungan. Namun, peningkatan jumlah kader tidak otomatis meningkatkan suara karena turut dipengaruhi kualitas pembinaan, distribusi kader, strategi kemenangan, dan karakteristik pemilih.

Menakar Anatomi Organisasi PKS dalam Perspektif Klasik Maurice Duverger

Duverger (1954) membedakan partai kader yang mengutamakan kualitas, disiplin, dan loyalitas dengan partai massa yang menekankan jumlah anggota. Perspektif ini digunakan untuk menilai kekuatan PKS melalui kualitas pembinaan, keaktifan kader, dan kemampuan menjalankan fungsi politik, bukan hanya jumlah anggota terdaftar.

Tipologi Insentif dan Pelembagaan Organisasi ala Angelo Panebianco

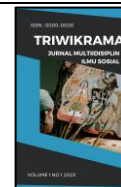
Panebianco (1988) menekankan pentingnya pelembagaan dalam menjaga identitas, struktur, dan keberlanjutan partai. Dalam penelitian ini, perspektif tersebut digunakan untuk memahami bagaimana loyalitas kader, pembinaan, dan koordinasi internal memengaruhi kemampuan DPD PKS mengelola kemenangan pemilu.

Perilaku Pemilih Rasional dan Dimensi Partai Menurut V. O. Key Jr.

Perspektif V. O. Key Jr. digunakan untuk memahami bahwa pilihan pemilih berkaitan dengan penilaian terhadap partai, kandidat, dan kondisi masyarakat. Kedekatan kader dengan masyarakat, reputasi kandidat, dan komunikasi politik dapat memengaruhi kepercayaan serta dukungan elektoral di setiap wilayah.

Ancaman Birokratisasi dan Hukum Besi Oligarki Robert Michels

Michels menjelaskan kecenderungan organisasi besar memusatkan keputusan pada kelompok elite melalui konsep hukum besi oligarki. Perspektif ini membantu menilai pentingnya koordinasi, pembagian peran, komunikasi internal, dan keterlibatan kader agar struktur organisasi dapat mendukung kaderisasi serta kemenangan secara efektif.



2. METODE

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui data naratif dan kontekstual. Metode ini digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan sistem kaderisasi PKS di masing-masing DPD wilayah Bandung Raya serta kontribusinya terhadap kemenangan atau kegagalan dalam Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2024. Penelitian tidak berfokus pada pengujian hipotesis, tetapi pada pemahaman proses, pola, dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kaderisasi dan kemenangan pemilu.

Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah struktur dan dinamika organisasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di empat wilayah Bandung Raya, yaitu Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Keempat wilayah tersebut dipilih karena berada dalam kawasan geografis dan struktur partai yang sama, tetapi menunjukkan perbedaan jumlah kader serta capaian elektoral pada Pileg 2024.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian terdiri atas 12 informan kunci yang berasal dari empat DPD PKS di Bandung Raya. Informan tersebut meliputi Ketua DPD atau pihak yang mewakili, pengurus Bidang Kaderisasi dan Pembinaan Anggota Partai (BKAP), serta pengurus Bidang Kemenangan Pemilu dan Pilkada (BP3) pada setiap wilayah. Pemilihan informan didasarkan pada peran dan pengetahuan mereka mengenai kebijakan organisasi, pelaksanaan kaderisasi, serta strategi kemenangan pemilu.

Jenis dan Sumber Data

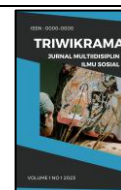
Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari wawancara mendalam dengan para informan kunci mengenai pelaksanaan kaderisasi, peran kader, strategi kemenangan, dan evaluasi hasil pemilu. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dokumen internal partai, pedoman kaderisasi, laporan kegiatan, arsip organisasi, serta data hasil Pileg 2019 dan 2024. Data sekunder digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi informasi dari wawancara.

Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis yang memandang realitas sosial dan politik sebagai hasil konstruksi sosial yang dibentuk oleh aktor, interaksi, nilai, dan konteks tertentu. Paradigma ini digunakan untuk memahami bagaimana setiap DPD PKS memaknai dan menjalankan kaderisasi serta strategi kemenangan berdasarkan pengalaman dan kondisi lokal masing-masing wilayah.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus komparatif (*comparative case study*). Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengkaji secara mendalam sekaligus membandingkan pelaksanaan kaderisasi dan strategi kemenangan Pileg 2024 di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Perbandingan dilakukan untuk



mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta faktor kontekstual yang memengaruhi variasi capaian elektoral PKS.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara langsung dengan panduan semi-terstruktur kepada Ketua DPD atau perwakilannya, pengurus BKAP, dan pengurus BP3. Wawancara berfokus pada efektivitas sistem kaderisasi, peran kader dalam kemenangan Pileg 2024, strategi kampanye, mobilisasi kader dan simpatisan, serta evaluasi capaian elektoral. Studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen internal dan eksternal yang relevan, seperti hasil perolehan kursi Pileg 2024, laporan evaluasi kemenangan, pedoman kaderisasi, publikasi resmi PKS, dan data hasil pemilu sebelumnya. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat temuan wawancara.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan. Pertama, reduksi data, yaitu menyeleksi dan menyederhanakan data wawancara serta dokumentasi yang relevan dengan kaderisasi, strategi kemenangan, dan capaian elektoral. Kedua, penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif, tabel perbandingan, atau matriks untuk melihat pola dan perbedaan antarwilayah. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menafsirkan data untuk menjawab pertanyaan penelitian serta memeriksa konsistensi kesimpulan dengan data lapangan.

Keabsahan Data dan Hasil Penelitian

Keabsahan data dijaga melalui empat kriteria *trustworthiness*, yaitu kredibilitas (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Kredibilitas diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai informan serta triangulasi teknik dengan mencocokkan hasil wawancara dan dokumentasi. Keteralihan didukung melalui deskripsi konteks penelitian secara rinci, sedangkan kebergantungan dan kepastian digunakan untuk menjaga konsistensi proses penelitian serta memastikan bahwa temuan didasarkan pada data empiris.

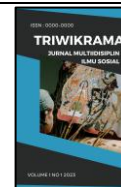
Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada DPD PKS Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Pemilihan lokasi didasarkan pada adanya perbedaan pelaksanaan kaderisasi dan hasil Pileg 2024 di antara keempat wilayah tersebut. Penelitian berfokus pada perbandingan efektivitas kaderisasi dan strategi kemenangan dalam menjelaskan variasi capaian elektoral PKS di Bandung Raya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengantar Pembahasan Penelitian

Penelitian ini mengkaji studi komparatif kaderisasi dan kemenangan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 pada DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Penelitian berangkat dari fenomena bahwa keempat DPD menerapkan sistem kaderisasi yang secara formal relatif seragam melalui manhaj tarbiyah dan Pertemuan Pelaksana Unit Pembinaan Anggota (P2 UPA), tetapi menghasilkan capaian elektoral yang berbeda. Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat mengalami



peningkatan suara disertai penambahan kursi, sedangkan Kota Bandung hanya mengalami pertumbuhan suara yang relatif kecil meskipun kehilangan dua kursi, dan Kabupaten Bandung mengalami penurunan suara sehingga tidak berhasil menjadi pemenang pemilu legislatif di wilayahnya.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keseragaman sistem kaderisasi tidak selalu menghasilkan keberhasilan elektoral yang sama. Penelitian ini berfokus pada efektivitas kaderisasi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas kader, strategi dan kinerja tim pemenangan pemilu, serta relevansi peningkatan jumlah kader terhadap perolehan suara. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pimpinan DPD, bidang Kaderisasi dan Pembinaan Anggota Pemenangan (BKAP), serta bidang Pemenangan Pemilu (BP3) pada masing-masing wilayah. Data wawancara dilengkapi dengan dokumentasi jumlah kader, perolehan suara, Daftar Pemilih Tetap (DPT), mekanisme konversi suara Sainte-Laguë, dan perubahan daerah pemilihan.

Analisis efektivitas kaderisasi menggunakan konsep manhaj tarbiyah, tipologi partai kader dari Maurice Duverger (1954), serta teori pelebagaan dan insentif organisasi dari Angelo Panebianco (1988). Duverger menekankan pentingnya kualitas dan disiplin anggota dalam partai kader, sedangkan Panebianco menjelaskan ikatan anggota melalui insentif kolektif-ideologis dan material-selektif. Kerangka ini digunakan untuk menilai apakah peningkatan jumlah pemegang Kartu Tanda Anggota (KTA) benar-benar menghasilkan kader yang terbina dan memiliki militansi ideologis, atau hanya menambah jumlah anggota secara administratif.

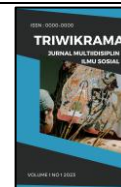
Sementara itu, efektivitas strategi pemenangan dianalisis melalui pemikiran Anthony Downs (1957), Giovanni Sartori (1976), Pippa Norris (2000), Gary Cox (1997), serta Aspinall dan Sukmajati (2015). Kerangka tersebut digunakan untuk memahami rasionalitas partai dalam memperoleh suara, kapasitas organisasi, mobilisasi akar rumput, pengaruh sistem pemilu, dan peran figur calon legislatif. Adapun relevansi kaderisasi terhadap perolehan suara dianalisis melalui tiga dimensi partai menurut V.O. Key Jr. (1966), yaitu party as organization, party in the electorate, dan party in government, serta Hukum Besi Oligarki dari Robert Michels (1911). Kerangka ini menegaskan bahwa penguatan organisasi melalui pertambahan kader tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan dukungan pemilih, tetapi juga bergantung pada kualitas kader, kedekatan dengan masyarakat, kinerja partai, dan dinamika internal organisasi.

Hasil Wawancara DPD PKS Kabupaten Bandung Barat

Ketua DPD PKS Kabupaten Bandung Barat

Berdasarkan wawancara dengan Iman Budiman, S.Thi., M.Ag., kaderisasi PKS Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan secara berkelanjutan, baik pada masa pemilu maupun di luar masa pemilu. Menjelang Pemilu Legislatif 2024, penekanannya terletak pada penguatan strategi teknis dan pergerakan kader di lapangan. Penambahan kader dilakukan jauh sebelum pemilu agar anggota memiliki kesiapan dalam menjalankan tugas pemenangan. Menurutnya, jumlah kader berpengaruh terhadap perolehan suara karena wilayah yang memiliki banyak kader cenderung memperoleh suara PKS lebih besar.

Integrasi kaderisasi dan pemenangan dilakukan dengan menjadikan Unit Pembinaan Anggota (UPA) sebagai ujung tombak pergerakan di wilayah masing-masing. Koordinasi dilaksanakan melalui rapat pleno bulanan dan rapat pimpinan mingguan, dengan fokus memperkuat struktur hingga tingkat RT/RW. Keberhasilan organisasi didukung oleh soliditas, militansi, dan kemampuan bekerja sama. Sementara itu, hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, persaingan antarpolitik, serta distribusi kader dan tenaga pembina (murobbi) yang belum merata. Oleh karena itu, diperlukan pemerataan pembina dan penguatan



kualitas kader agar pertumbuhan jumlah anggota dapat menghasilkan dukungan elektoral yang nyata.

Ketua Bidang BKAP

Dedi Rohaendi, S.T., menjelaskan bahwa kaderisasi dilaksanakan melalui pertemuan rutin P2 UPA yang intensitasnya ditingkatkan menjelang pemilu untuk memastikan instruksi organisasi tersampaikan kepada anggota. Program pembinaan tidak hanya berorientasi pada penambahan jumlah kader, tetapi juga pada penguatan pemahaman politik sebagai bagian dari dakwah. Pembinaan spiritual melalui halaqah, tilawah, dan ubudiyah dilakukan untuk menjaga semangat serta militansi kader. Jumlah kader pada tingkat tertentu mengalami peningkatan dari sekitar 600-700 menjadi 886 orang. Namun, efektivitas kaderisasi masih dipengaruhi oleh kemampuan individu, kesibukan pekerjaan, kondisi spiritual, dan kedisiplinan pembina dalam menjalankan tugas. Keterbatasan jumlah murobbi dibandingkan dengan pertumbuhan anggota juga menjadi kendala. Dengan demikian, BKAP menekankan pentingnya menjaga kualitas pembinaan, memperkuat hubungan antarkader, dan meratakan distribusi tenaga pembina.

Ketua Bidang BP3

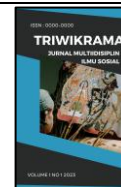
Lathief Rachman, S.P., menyampaikan bahwa strategi kemenangan Pemilu 2024 bertumpu pada pergerakan kader dan optimalisasi peran calon legislatif. Kader digunakan sebagai mesin kemenangan melalui program Pangaping Sora, yang menargetkan setiap kader menjaga minimal sepuluh suara di lingkungan sekitarnya secara berkelanjutan hingga 2029. Wilayah yang memiliki kader atau pernah dikunjungi kader cenderung memperoleh suara lebih besar dibandingkan wilayah yang tidak terjangkau pergerakan kader. Selain jumlah kader, keberhasilan kemenangan dipengaruhi oleh jaringan tim sukses calon legislatif, ketokohan di masyarakat, kemampuan berkomunikasi dengan pemilih muda melalui media sosial, dan efektivitas pendekatan langsung kepada masyarakat. Hambatan yang dihadapi mencakup keterbatasan pembiayaan, pragmatisme pemilih, pengalaman negatif dalam dinamika politik sebelumnya, serta gesekan internal antarpengukung calon legislatif.

Evaluasi dilakukan berdasarkan data, survei, pemantauan media, dan pemetaan suara hingga tingkat RW/RT. Narasumber menekankan bahwa kualitas kader penting karena kader yang kompeten mampu membangun pengaruh lebih luas. Oleh sebab itu, program One RW One UPA diarahkan untuk memperluas jangkauan pembinaan dan menjaga dukungan suara secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, hasil wawancara di Kabupaten Bandung Barat memperlihatkan bahwa kaderisasi, soliditas organisasi, pembinaan spiritual, dan pemerataan struktur kewilayahan dipandang sebagai faktor penting dalam mendukung peningkatan suara PKS.

Hasil Wawancara DPD PKS Kota Cimahi

Ketua DPD PKS Kota Cimahi

Reza Mahdi, A.Md., menjelaskan bahwa kaderisasi PKS Kota Cimahi dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu rekrutmen, pembinaan, dan penugasan. Rekrutmen dilakukan secara inklusif melalui berbagai sayap organisasi, seperti Rumah Keluarga Indonesia (RKI), komunitas olahraga, dan kelompok pemuda. Pendekatan tersebut bertujuan membangun kedekatan dengan masyarakat sekaligus memperkuat loyalitas kader agar tidak mudah terpengaruh politik uang. Jumlah pemegang KTA mengalami peningkatan yang besar, dari sekitar 3.000 orang menjadi 7.000 orang, kemudian mencapai 25.000 orang dalam basis data keanggotaan. Peningkatan tersebut menurut narasumber berkaitan dengan kenaikan suara PKS dari sekitar 50.000 menjadi lebih dari 70.000 suara. Untuk mengintegrasikan kaderisasi dengan kemenangan, DPD melakukan evaluasi setiap enam bulan, survei elektabilitas berdasarkan wilayah, serta pemantauan mingguan melalui



kelompok pembinaan atau mutabaah. Menurut Reza Mahdi, keberhasilan pemenangan sangat bergantung pada pergerakan kader karena kader merupakan ujung tombak organisasi. Tantangan yang dihadapi meliputi hambatan komunikasi antara struktur dan anggota serta kebutuhan ekonomi kader. Oleh karena itu, perhatian terhadap kebutuhan anggota dan penguatan ukhuwah menjadi bagian penting dalam membangun loyalitas dan meningkatkan partisipasi kader dalam kegiatan pemenangan.

Ketua Bidang BKAP

Iwan Hendrawan, S.Pd.I., menjelaskan bahwa BKAP berperan mendukung pemenangan melalui rekrutmen KTA secara masif dan pembinaan anggota melalui liqo. Dari lebih dari 20.000 anggota baru yang memiliki KTA, sekitar 1.000 orang berhasil memasuki jenjang kader terbina. Kondisi ini menunjukkan bahwa penambahan anggota secara administratif belum sepenuhnya diikuti peningkatan jumlah kader yang menjalani pembinaan secara berjenjang. Pembinaan diarahkan pada pengembangan kemampuan komunikasi, ketokohan, dan pemahaman organisasi. Menurut narasumber, peningkatan jumlah kader berkaitan dengan perolehan suara, dengan perkiraan rata-rata satu kader berbanding sepuluh suara. Namun, kontribusi tersebut dipengaruhi kemampuan individu dan faktor eksternal.

Tidak semua pemegang KTA memiliki kesadaran politik yang kuat karena sebagian bergabung dengan motif memperoleh bantuan sosial atau dorongan tim sukses. Kendala utama BKAP adalah keterbatasan jumlah murobbi, minimnya kader dari kalangan Generasi Z, dan persoalan ekonomi yang dapat menurunkan semangat anggota. Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan regenerasi kader muda, peningkatan kemampuan pembina dalam menyelesaikan masalah anggota, serta penguatan proses pembinaan agar anggota baru memiliki keterikatan yang lebih kuat terhadap organisasi.

Ketua Bidang BP3

Angi Permana, S.T., menyampaikan bahwa strategi pemenangan Pemilu 2024 dilaksanakan melalui lima prinsip, yaitu menyisir seluruh RW, mengoptimalkan peran pejabat publik, menyusun jajaran calon legislatif potensial, memetakan dapil berdasarkan data tokoh dan wilayah, serta mengelola kegiatan kampanye. Keberadaan kader dipandang sangat strategis karena wilayah dengan kader aktif cenderung memiliki perolehan suara yang lebih tinggi. Menurut narasumber, sekitar 70-80% wilayah dengan kader aktif menunjukkan perbedaan perolehan suara yang mencolok dibandingkan wilayah yang minim kader. Meskipun demikian, perolehan suara juga dipengaruhi politik uang, kualitas pergerakan kader, dan efektivitas pejabat publik. Dengan demikian, keberadaan kader harus disertai aktivitas yang terarah agar mampu memperluas dukungan masyarakat.

Hambatan pemenangan meliputi kedisiplinan kader dalam menyampaikan laporan kegiatan, ketidaklengkapan data lapangan, dan pergerakan calon legislatif yang terkadang tidak sejalan dengan arahan struktur partai. Narasumber lebih menekankan kualitas kader terbina karena kader yang memiliki pemahaman organisasi dan kemampuan berinteraksi dengan masyarakat dapat memberikan pengaruh positif. Oleh sebab itu, koordinasi antara BKAP, BP3, dan calon legislatif perlu diperkuat melalui perencanaan bersama, edukasi politik sejak dini, serta optimalisasi peran pejabat publik. Secara keseluruhan, hasil wawancara di Kota Cimahi menunjukkan bahwa peningkatan jumlah anggota dapat mendukung pertumbuhan suara, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada pembinaan, kualitas kader, kedisiplinan organisasi, dan konsistensi strategi pemenangan di tingkat wilayah.



Hasil Wawancara DPD PKS Kota Cimahi Perwakilan Ketua DPD PKS Kabupaten Bandung

Agus Setiawan, S.H., selaku Anggota Fraksi DPRD Kabupaten Bandung, menjelaskan bahwa kaderisasi dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat pusat hingga unit organisasi terkecil. Menjelang pemilu, kegiatan kaderisasi diarahkan pada penguatan kemenangan di tingkat akar rumput melalui DPC, DPRA, dan RW, dengan menyesuaikan kondisi sosial masyarakat setempat. Pendekatan yang digunakan antara lain kegiatan bakti sosial, pemeriksaan kesehatan, dan majelis taklim. Penambahan kader dilakukan melalui KTA-isasi secara masif, tetapi distribusinya belum merata di seluruh dapil. Beberapa wilayah memiliki basis kader yang kuat, sedangkan wilayah lain masih kekurangan anggota. Meskipun secara teori peningkatan kader diharapkan dapat meningkatkan suara, perolehan suara PKS Kabupaten Bandung pada 2024 justru menurun dibandingkan 2019.

Narasumber mengaitkan kondisi tersebut dengan politik uang, strategi kompetitor yang menysar basis suara PKS menjelang akhir kampanye, serta kesiapan kader dalam menghadapi perubahan strategi pencalonan. Koordinasi antara DPD, BKAP, dan BP3 dilakukan melalui Rapat Pengurus Harian secara rutin setiap minggu atau dua minggu sekali. Evaluasi tidak hanya menekankan jumlah KTA, tetapi juga validitas data dan status pembinaan anggota. Menurut narasumber, anggota yang sekadar terdaftar tanpa mengikuti pembinaan UPA secara intensif belum tentu mampu memberikan kontribusi nyata dalam kemenangan. Oleh karena itu, penguatan soliditas kader pelopor, pemerataan distribusi kader, serta komunikasi antara pengurus daerah dan pengurus desa menjadi kebutuhan utama organisasi.

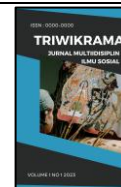
Ketua Bidang BKAP

Asep Ramdhan, S.T., menjelaskan bahwa program kaderisasi menargetkan 40.000 anggota ber-KTA dengan perhatian terhadap validitas alamat dan nomor kontak agar anggota dapat ditindaklanjuti melalui silaturahmi langsung. Jumlah anggota terdaftar meningkat hingga sekitar 40.000 orang, tetapi jumlah kader aktif yang mengikuti pembinaan pekanan melalui UPA relatif stabil pada kisaran 5.000 orang. Pembinaan dilakukan melalui halaqah yang mencakup materi keagamaan, kepartaian, politik, sosial kemasyarakatan, dan kebangsaan. Menurut narasumber, secara statistik satu kader terbina rata-rata berkaitan dengan sekitar 40 pemilih, berdasarkan perbandingan 5.000 kader terbina dengan sekitar 200.000 suara. Namun, kemampuan setiap kader dalam memengaruhi pemilih berbeda-beda, sehingga angka tersebut merupakan rasio agregat dan bukan ukuran kontribusi yang seragam bagi setiap anggota.

Evaluasi setelah Pemilu 2024 menunjukkan bahwa militansi kader belum maksimal dalam menghasilkan peningkatan suara yang signifikan. Selain keterbatasan kemampuan individu, tantangan lainnya adalah merekrut generasi muda karena adanya sentimen antipolitik dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, BKAP menekankan pentingnya regenerasi, pembinaan yang berkelanjutan, serta pendekatan kepada pemilih muda untuk memperkuat keberlanjutan organisasi.

Ketua Bidang BP3

Yudi Kusnandar, S.Si., menyampaikan bahwa strategi kemenangan dilaksanakan melalui pemetaan TPS menjadi wilayah menang, menengah, dan nol. Selain itu, perekrutan calon legislatif eksternal dari kalangan tokoh dilakukan untuk menggarap wilayah yang minim kader atau belum memiliki struktur organisasi yang lengkap. Kader juga didorong untuk aktif dalam struktur sosial masyarakat, seperti menjadi ketua RT/RW atau pengurus DKM, agar memiliki pengaruh yang tumbuh melalui hubungan sosial secara langsung. Menurut narasumber, pertumbuhan kader merupakan faktor penting bagi perolehan suara. Namun, pada Pemilu 2024, suara PKS Kabupaten



Bandung cenderung stagnan atau menurun karena pergerakan kader belum efektif dan terjadi gesekan internal, terutama ketika calon legislatif eksternal mengambil basis suara yang sebelumnya dibangun oleh kader internal. Selain itu, kehadiran calon dari kalangan Generasi Z dan penggunaan media sosial dinilai penting untuk menjangkau pemilih muda yang lebih memperhatikan figur dan isu politik.

Evaluasi kontribusi kader dilakukan dengan melihat perolehan suara di TPS tempat kader tinggal. Perolehan suara yang rendah menjadi indikasi bahwa pengaruh kader di lingkungan masyarakat belum optimal. Narasumber lebih mengutamakan kualitas kader, khususnya kemampuan membangun hubungan sosial dan memengaruhi pemilih. Rekomendasi yang disampaikan meliputi pengaktifan kembali taklim bulanan bagi pengurus, penyamaan visi organisasi, dan penguatan fungsi pengawasan pejabat publik agar dapat membangun citra positif partai. Secara keseluruhan, hasil wawancara di Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa peningkatan jumlah KTA belum cukup untuk menjamin peningkatan suara. Distribusi kader yang tidak merata, kesenjangan antara anggota terdaftar dan kader terbina, konflik internal, serta strategi calon legislatif menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas kemenangan.

Hasil Wawancara DPD PKS Kota Bandung

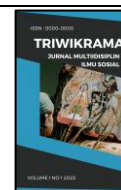
Perwakilan Ketua DPD PKS Kota Bandung

Susanto Triyogo Adiputro, S.ST., M.T., yang mewakili Ketua DPD PKS Kota Bandung, menjelaskan bahwa kaderisasi dilaksanakan melalui program KTA-isasi dengan melibatkan seluruh unsur organisasi, mulai dari sayap partai, bidang-bidang, hingga kader di lingkungan masyarakat. Program tersebut berhasil meningkatkan jumlah anggota hingga sekitar 78.000 pemegang KTA. Menurut narasumber, kader memiliki peran penting dalam membangun komunikasi politik dan memperluas dukungan masyarakat, terutama melalui hubungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal. Strategi kemenangan diarahkan pada segmen pemilih utama, termasuk perempuan melalui program Rumah Keluarga Indonesia (RKI), kelompok pemuda, serta penguatan citra partai melalui isu pangan murah, kesehatan terjangkau, dan akses pendidikan.

Integrasi kaderisasi dan kemenangan dilakukan melalui pembagian tugas antara BKAP dan BP3. BKAP berfokus pada penguatan kader sebagai penggerak organisasi, penyiapan saksi, dan koordinasi wilayah. Sementara itu, BP3 berfokus pada pengelolaan isu politik, pemetaan wilayah, analisis kompetitor, dan penyusunan strategi kemenangan. Meskipun basis pemilih PKS dari kalangan berpendidikan dan menengah ke atas dinilai masih solid, perubahan daerah pemilihan dari enam menjadi tujuh dapil menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perolehan kursi. PKS Kota Bandung mengalami penurunan jumlah kursi dari 13 menjadi 11 kursi meskipun perolehan suara meningkat. Tantangan lainnya adalah politik uang, keterbatasan waktu kader karena pekerjaan, dan kebutuhan memperluas jangkauan kepada pemilih muda. Oleh karena itu, narasumber menekankan bahwa peningkatan jumlah KTA harus disertai penguatan kader penggerak dan perluasan aktivitas sosial agar kader mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat RW, RT, dan TPS.

Perwakilan Ketua Bidang BKAP

Kodiron, A.Md., menjelaskan bahwa program KTA-isasi dilaksanakan secara masif sejak awal 2021 dengan target awal 40.000 anggota, kemudian meningkat hingga sekitar 75.000 pemegang KTA menjelang Pemilu 2024. Program tersebut didukung pembinaan pimpinan menjadi tim sukses serta kegiatan PKS Menyapa sebagai bentuk dukungan teknis di lapangan. Meskipun jumlah pemegang KTA meningkat secara signifikan, jumlah kader penggerak aktif hanya berada



pada kisaran 6.000 orang. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan keanggotaan secara administratif dan peningkatan kader yang aktif menjalankan kegiatan organisasi. Pembinaan kualitas dilakukan melalui penguatan aspek spiritual, termasuk program perbaikan bacaan dan hafalan Al-Qur'an, untuk mengatasi kejenuhan politik dan meningkatkan kembali militansi kader.

Koordinasi antara BKAP dan BP3 dilakukan melalui rapat rutin mingguan serta penyampaian data kader pelopor dan penggerak berdasarkan wilayah. Menurut narasumber, keberadaan kader di suatu RW cenderung berkaitan dengan perolehan suara yang lebih baik. Namun, penambahan KTA tidak selalu menghasilkan peningkatan suara secara sebanding karena efektivitas kader dipengaruhi oleh motivasi, pemahaman politik sebagai bagian dari dakwah, dan kepercayaan terhadap calon maupun hasil pemilu. Kendala utama yang dihadapi adalah luasnya wilayah kerja, banyaknya jumlah anggota, serta keterbatasan program P2 UPA dalam menampung seluruh persoalan kader. Oleh karena itu, BKAP menekankan percepatan pembinaan, peningkatan jenjang kader, dan penguatan kembali orientasi perjuangan organisasi.

Perwakilan Ketua Bidang BP3

Pujo Raharjo, S.T., yang mewakili BP3, menjelaskan bahwa strategi pemenangan dilaksanakan melalui pengaktifan struktur partai dari tingkat DPD hingga RT/RW, mobilisasi pejabat publik, dan pemanfaatan jaringan calon legislatif. Salah satu strategi utama yang digunakan adalah direct selling atau pendekatan dari rumah ke rumah melalui tim Ranger. Dalam pelaksanaan Pemilu 2024, BP3 merekrut 7.424 saksi sesuai dengan jumlah TPS yang menjadi sasaran pengamanan suara. Kader dan simpatisan diprioritaskan untuk menjalankan tugas tersebut agar dapat membantu menjaga suara partai sekaligus membangun komunikasi dengan pemilih di lingkungan masing-masing.

Menurut narasumber, jumlah kader dan perolehan suara secara umum menunjukkan hubungan positif. Namun, peningkatan KTA di Kota Bandung hanya diikuti kenaikan sekitar 2.500 suara. Kondisi tersebut dikaitkan dengan pragmatisme pemilih, perubahan dapil, serta sistem penghitungan suara Sainte-Laguë. Faktor lain yang menentukan perolehan suara adalah keaktifan calon legislatif dalam bersilaturahmi dan melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat. Koordinasi pemenangan dilaksanakan melalui Satgas Pemenangan yang melibatkan berbagai bidang organisasi, termasuk BKAP. Evaluasi dilakukan menggunakan sistem informasi daring untuk memantau laporan kegiatan tim lapangan serta survei kepuasan kader terhadap kinerja pejabat publik. Namun, pelaksanaan pemenangan masih menghadapi penurunan militansi kader, keterbatasan tenaga penggerak, dan kebutuhan memperluas jangkauan masyarakat melalui tim Ranger.

Berbeda dengan pandangan yang lebih menekankan kualitas kader terbina, BP3 Kota Bandung juga menekankan pentingnya kuantitas dan pemerataan kader. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyebaran kader yang luas dapat memperkuat kehadiran partai di berbagai TPS. Meskipun demikian, peningkatan jumlah anggota tetap perlu diimbangi dengan pembinaan spiritual, penguatan militansi, dan peningkatan kinerja pejabat publik.

Dataset penelitian

Dataset Penelitian ini mencakup empat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yaitu DPD PKS Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Penelitian berfokus pada hubungan antara kaderisasi dan strategi pemenangan Pemilu Legislatif 2024 dengan mempertimbangkan karakteristik serta tantangan politik di masing-masing wilayah. Subjek penelitian meliputi unsur pimpinan DPD, Bidang Kaderisasi dan Anggota



Partai (BKAP), serta Bidang Pemenangan Pemilu dan Pemilihan (BP3) yang memberikan informasi mengenai proses kaderisasi, mobilisasi politik, dan pelaksanaan strategi pemenangan.

Penelitian menggunakan Manhaj Tarbiyah dan teori pemenangan pemilu legislatif sebagai applied theory, dengan didukung teori partai politik dan kaderisasi-rekrutmen, mobilisasi politik, jaringan sosial, pelebagaan partai, perilaku pemilih, kinerja organisasi, serta teori lain yang disesuaikan dengan fokus permasalahan setiap DPD. Pada DPD PKS Kota Bandung, penelitian menitikberatkan pada efektivitas program KTA-isasi dalam mempertahankan basis suara di tengah karakteristik pemilih perkotaan yang rasional, dampak pemekaran daerah pemilihan dari enam menjadi tujuh dapil terhadap perolehan kursi, serta kemampuan kader dalam memitigasi politik uang dan mengamankan suara. Indikator yang diperhatikan meliputi konversi sekitar 80.000 KTA menjadi kekuatan organisasi di tingkat TPS, hubungan antara kader terbina dan perolehan suara di 30 kecamatan, serta efektivitas pengamanan suara.

Pada DPD PKS Kota Cimahi, fokus penelitian diarahkan pada hubungan antara peningkatan jumlah KTA dan kenaikan perolehan suara di wilayah perkotaan, serta efektivitas evaluasi berkala melalui survei elektabilitas setiap enam bulan. Indikatornya mencakup pemetaan kekuatan wilayah berdasarkan hasil survei, rasio kader terbina terhadap suara, dengan perkiraan satu kader mampu memengaruhi dua hingga tiga suara, serta jumlah KTA baru dan proporsi anggota yang meningkat ke jenjang kader terbina. Sementara itu, pada DPD PKS Kabupaten Bandung, penelitian menelaah hubungan antara penambahan jumlah kader dan penurunan perolehan suara pada Pemilu 2024, khususnya dalam menghadapi distribusi kader yang belum merata antar-daerah pemilihan. Indikator yang digunakan meliputi validitas data KTA di lapangan, perbedaan antara kader yang telah terbina dan anggota yang sekadar terdaftar, hasil survei elektabilitas sebagai pembandingan, serta rasio statistik sekitar satu kader terhadap 40 pemilih.

Adapun pada DPD PKS Kabupaten Bandung Barat, penelitian berfokus pada hubungan antara jumlah kader dan tren peningkatan suara dalam setiap periode pemilu serta optimalisasi distribusi kader antar-Unit Pembinaan Anggota (UPA) untuk pemerataan wilayah perdesaan. Indikator yang dikaji meliputi kelengkapan struktur partai hingga tingkat RT/RW, penerapan program Pangaping Sora dengan target minimal sepuluh suara yang dijaga oleh setiap kader, serta konsistensi hubungan antara jumlah kader dan tren perolehan suara. Secara keseluruhan, penyajian dataset ini menjadi peta jalan penelitian yang memberikan gambaran mengenai objek, subjek, fokus utama, landasan teori, dan indikator pada setiap DPD. Susunan tersebut menjadi dasar analisis komparatif untuk memahami persamaan dan perbedaan pelaksanaan kaderisasi serta strategi pemenangan PKS di keempat wilayah penelitian.

Perolehan Data Objek Penelitian

Rekapitulasi Data Kader dan Perolehan Suara

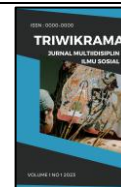
Tabel 1. Tabel Rekapitulasi Jumlah Kader dan Perolehan Suara

DPD PKS Se-Bandung Raya Periode 2019 dan 2024

DPD PKS	Tahun	Jumlah KTA	Jumlah Kader Terbina	Perolehan Suara Pileg DPRD
Kabupaten Bandung Barat	2019	17.537	2.112	126.661
	2024	39.543	2.544	158.710
Kota Cimahi	2019	6.119	1.463*	53.909

*Corresponding author

E-mail addresses: emailpenulis@gmail.com



	2024	24.337	902*	70.988
Kabupaten Bandung	2019	perlu dilengkapi penulis	2.851	273.111
	2024	perlu dilengkapi penulis	3.880	254.887
Kota Bandung	2019	83.092**	3.920**	295.615
	2024	perlu dilengkapi penulis	perlu dilengkapi penulis	297.937

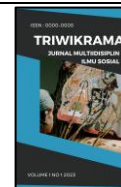
Keterangan: (*) Jumlah kader terbina Kota Cimahi dengan mengurangi total kader pada jenjang Pemula, karena jenjang tersebut belum diwajibkan mengikuti Unit Pembinaan Anggota (UPA) sehingga belum dapat dikategorikan sebagai kader terbina. (**) Angka KTA dan kader terbina Kota Bandung 2019 merupakan angka capaian kumulatif data tersebut belum tersedia secara eksplisit pada dokumentasi DPD terkait dan perlu dilengkapi oleh penulis melalui konfirmasi data primer sebelum sidang skripsi.

**Tabel 2. Pertumbuhan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Se Bandung Raya
Periode 2012-2024**

Wilayah Kabupaten / Kota	DPT Pemilu DPRD 2019	DPT Pemilu DPRD 2024	Pertumbuhan Absolut (Jiwa)	Persentase Pertumbuhan (%)
Kota Bandung	1.739.213	1.887.881	148.668	8,55% (Bandung K. K., Jumlah DPT Pemilu Legislatif 2024, 2024)
Kota Cimahi	379.484	419.974	40.490	10,67% (Cimahi, Jumlah DPT 2024, 2024)
Kabupaten Bandung	2.356.412	2.664.172	307.760	13,06% (Bandung K. K., DPT PILEG 2024)
Kabupaten Bandung Barat	1.180.111	1.309.568	129.457	10,97% (Barat, Jumlah DPT PILEG 2024, 2024)
Total Bandung Raya	5.655.220	6.281.595	626.375	11,08%

Tabel ini merekapitulasi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) beserta pertumbuhan absolut dan persentasenya di empat wilayah penelitian, yaitu Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat, dari Pemilu 2019 menuju Pemilu 2024. Data menunjukkan pertumbuhan DPT sebesar 11,08% atau lebih dari 626 ribu pemilih di wilayah Bandung Raya. Pertumbuhan tersebut menjadi konteks penting dalam menganalisis perolehan suara PKS karena memperluas basis pemilih yang berpotensi diperebutkan oleh seluruh partai politik peserta pemilu. Dengan demikian, perubahan perolehan suara PKS perlu dipahami dengan mempertimbangkan pertumbuhan pemilih, peningkatan jumlah kader, dan persaingan politik di setiap daerah pemilihan.

Data DPT Kota Bandung pada Pemilu 2024 tercatat sebanyak 1.887.881 pemilih yang tersebar di 3.950 TPS. Sementara itu, perkembangan data menjelang pemungutan suara



menunjukkan jumlah pemilih terdaftar mencapai 1.890.788 jiwa. Adapun data DPT Kabupaten Bandung pada Pemilu 2019 tercatat sebanyak 2.356.412 pemilih. Data tersebut memberikan gambaran mengenai besarnya basis pemilih di wilayah penelitian yang menjadi konteks dalam menganalisis strategi kaderisasi dan pemenangan PKS pada Pemilu Legislatif 2024.

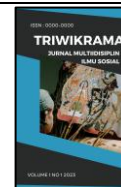
Metode Sainte-Laguë dalam Pemilu Legislatif Indonesia

Metode Sainte-Laguë murni digunakan untuk mengonversi perolehan suara partai politik menjadi kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Metode ini mulai diterapkan sejak Pemilu 2019 sebagai pengganti metode Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) yang digunakan pada Pemilu 2014. Dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 415 ayat (2) untuk penentuan kursi DPR dan Pasal 415 ayat (3) untuk penentuan kursi DPRD provinsi serta DPRD kabupaten/kota. Ketentuan tersebut mengatur pembagian suara sah partai politik menggunakan bilangan pembagi ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya, hingga seluruh kursi di setiap daerah pemilihan terbagi.

Cara Kerja Rumus murni dilakukan dengan membagi suara sah setiap partai politik menggunakan bilangan pembagi 1 untuk menentukan perolehan kursi pertama. Selanjutnya, suara partai yang memperoleh kursi dibagi kembali dengan bilangan 3, kemudian hasilnya dibandingkan dengan hasil pembagian partai lain. Proses tersebut dilanjutkan menggunakan bilangan ganjil 5, 7, 9, dan seterusnya hingga seluruh kursi di daerah pemilihan terbagi. Berbeda dengan Sainte-Laguë modifikasi yang menggunakan pembagi awal 1,4, Indonesia menerapkan Sainte-Laguë murni dengan pembagi awal 1. Mekanisme ini membuat perolehan kursi tidak hanya ditentukan oleh jumlah suara secara keseluruhan, tetapi juga oleh distribusi suara dan persaingan antarpolisi dalam setiap dapil.

Dampak terhadap Partai Besar dan Partai Kecil, Metode Sainte-Laguë dirancang untuk menghasilkan pembagian kursi yang lebih proporsional dengan mengurangi keuntungan berlebihan bagi partai yang memperoleh suara besar sekaligus memberikan peluang kepada partai dengan perolehan suara lebih rendah. Namun, hasil konversi suara tetap bergantung pada jumlah kursi yang tersedia dan perbandingan suara antarpolisi di setiap dapil. Pembagian suara dengan bilangan ganjil yang semakin besar juga dapat menyebabkan sebagian suara tidak menghasilkan tambahan kursi. Oleh karena itu, peningkatan suara partai tidak selalu diikuti peningkatan jumlah kursi karena hasil akhirnya ditentukan oleh posisi hasil pembagian suara partai dibandingkan dengan partai pesaing.

Penentuan kursi DPR juga dipengaruhi oleh ambang batas parlemen sebagaimana diatur dalam Pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Partai politik harus memperoleh sekurang-kurangnya 4% dari jumlah suara sah nasional agar dapat diikutsertakan dalam penentuan kursi DPR. Partai yang tidak memenuhi ambang batas tersebut tidak disertakan dalam penghitungan kursi DPR di seluruh dapil. Namun, ambang batas 4% ini hanya berlaku untuk DPR RI dan tidak berlaku dalam penentuan kursi DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa ketentuan ambang batas parlemen tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024, tetapi harus ditinjau kembali untuk Pemilu 2029 dan seterusnya. Ketentuan tersebut menjadi konteks hukum dalam memahami mekanisme konversi suara menjadi kursi. Dalam penelitian ini, analisis perolehan kursi PKS di tingkat daerah lebih berkaitan dengan distribusi suara antarpolisi, jumlah kursi yang tersedia, dan penerapan metode Sainte-Laguë pada setiap dapil.



Perubahan Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Kota Bandung: dari 6 menjadi 7 Dapil

Perubahan jumlah daerah pemilihan DPRD Kota Bandung dari enam menjadi tujuh dapil pada Pemilu 2024 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Peraturan tersebut ditetapkan pada 6 Februari 2023 dan diumumkan oleh KPU Kota Bandung pada 8 Februari 2023. Penyusunan daerah pemilihan mengacu pada tujuh prinsip yang diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perubahan jumlah dapil menjadi faktor kontekstual dalam menganalisis perolehan kursi PKS di Kota Bandung. Meskipun suara PKS meningkat pada Pemilu 2024, jumlah kursinya menurun dari 13 menjadi 11 kursi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan suara tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kursi karena hasil akhirnya juga dipengaruhi oleh distribusi suara di setiap dapil, alokasi kursi, dan mekanisme konversi suara melalui Sainte-Laguë. Oleh karena itu, perubahan dapil perlu dipertimbangkan dalam mengevaluasi efektivitas kaderisasi dan strategi pemenangan PKS di Kota Bandung.

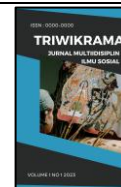
Tabel 3. Perubahan Jumlah Dapil DPRD Kota Bandung dari Periode Tahun 2019 ke Periode Tahun 2024 DPRD Kota Bandung

Aspek	Pemilu 2019	Pemilu 2024
Jumlah Dapil DPRD Kota Bandung	6 Dapil	7 Dapil
Total kursi DPRD Kota Bandung	50 kursi	50 kursi (tidak berubah)
Rentang kursi per Dapil	Paling kecil 6, paling besar 11 kursi	Paling kecil 6, paling besar 8 kursi

Perubahan penataan daerah pemilihan (dapil) DPRD Kota Bandung dari enam dapil pada Pemilu 2019 menjadi tujuh dapil pada Pemilu 2024 merupakan perubahan struktural yang penting dalam analisis perolehan suara PKS. Meskipun total alokasi kursi tetap sebanyak 50 kursi, pembagian kursi antar-dapil menjadi lebih proporsional, dari rentang 6-11 kursi pada skema sebelumnya menjadi 6-8 kursi pada skema baru. Perubahan ini menyebabkan data perolehan suara PKS per-dapil pada Pemilu 2019 dan 2024 tidak dapat dibandingkan secara langsung tanpa mempertimbangkan perubahan batas wilayah dan komposisi pemilih di setiap dapil. Penataan ulang tersebut bertujuan mengurangi ketimpangan alokasi kursi antar-dapil. Pada Pemilu 2019, perbedaan jumlah kursi antar-dapil dinilai terlalu besar sehingga diperlukan pembagian yang lebih proporsional. Oleh karena itu, perubahan dilakukan dengan tetap mempertahankan jumlah keseluruhan kursi DPRD Kota Bandung, tetapi menyesuaikan pembagian wilayah dan alokasi kursi untuk Pemilu 2024.

Proses Penyusunan (Uji Publik 3 Skema)

Dalam proses penyusunan dapil, KPU Kota Bandung menyelenggarakan uji publik terhadap tiga skema penataan pada 2022. Skema pertama mempertahankan enam dapil seperti Pemilu 2019, skema kedua menetapkan tujuh dapil dengan penataan ulang wilayah dan jumlah kursi, sedangkan skema ketiga menetapkan tujuh dapil dengan pembagian kursi yang relatif merata, yaitu mayoritas dapil memperoleh tujuh kursi dan satu dapil memperoleh delapan kursi. Pandangan partai politik terhadap ketiga skema tersebut berbeda. Empat partai, yaitu Golkar, NasDem, Partai Buruh, dan Demokrat, bersama kalangan akademisi mendukung skema kedua. Sementara itu, tujuh partai, termasuk PKS, PDI Perjuangan, Gerindra, Gelora, PSI, PBB, dan Perindo, menginginkan agar skema enam dapil tetap dipertahankan. Pada akhirnya, KPU RI



menetapkan skema kedua berupa tujuh dapil yang diterapkan dalam Pemilu 2024 melalui PKPU Nomor 6 Tahun 2023.

Rincian 7 Dapil DPRD Kota Bandung (Pemilu 2024)

Berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2023, pembagian wilayah dan alokasi kursi DPRD Kota Bandung pada Pemilu 2024 terdiri atas tujuh dapil. Dapil 1 mencakup Kecamatan Coblong, Cidadap, Bandung Wetan, Cibeunying Kidul, Cibeunying Kaler, dan Sumur Bandung dengan alokasi delapan kursi. Dapil 2 meliputi Batununggal, Lengkong, dan Kiaracondong dengan enam kursi. Dapil 3 mencakup Antapani, Arcamanik, Cibiru, Ujungberung, dan Mandalajati dengan delapan kursi. Selanjutnya, Dapil 4 meliputi Bandung Kidul, Buahbatu, Rancasari, Gedebage, Panyileukan, dan Cinambo dengan tujuh kursi. Dapil 5 mencakup Bojongloa Kaler, Astana Anyar, dan Regol dengan enam kursi. Dapil 6 meliputi Babakan Ciparay, Bandung Kulon, dan Bojongloa Kidul dengan tujuh kursi. Sementara itu, Dapil 7 mencakup Sukasari, Andir, Cicendo, dan Sukajadi dengan delapan kursi.

Rincian pembagian wilayah tersebut menjadi acuan dalam menafsirkan perolehan suara PKS pada setiap dapil dalam Pemilu 2024. Salah satu perubahan penting adalah perpindahan Kecamatan Sumur Bandung, yang sebelumnya berada di Dapil 2 pada skema lama, ke Dapil 1 pada skema baru. Perubahan ini memengaruhi komposisi wilayah dan basis pemilih pada kedua dapil sehingga perlu diperhitungkan dalam analisis komparatif perolehan suara PKS antara Pemilu 2019 dan 2024. Dengan demikian, evaluasi keberhasilan kaderisasi dan strategi kemenangan tidak cukup hanya membandingkan jumlah suara, tetapi juga perlu mempertimbangkan perubahan struktur dapil dan distribusi alokasi kursi.

PEMBAHASAN

Hasil Penelitian DPD PKS Kabupaten Bandung Barat

Sintesis Hasil Wawancara Ketua DPD, Ketua BKAP, dan Ketua BP3

Hasil wawancara dengan Iman Budiman, Dedi Rohaendi, dan Lathief Rachman menunjukkan adanya kesamaan pandangan mengenai pentingnya kaderisasi dalam kemenangan Pemilu Legislatif 2024. Kaderisasi PKS dilaksanakan secara berkelanjutan dan tidak hanya berorientasi pada momentum pemilu. Penguatan strategi teknis dilakukan menjelang pencoblosan, sedangkan pembinaan kader berlangsung melalui pertemuan rutin P2 UPA yang intensitasnya ditingkatkan menjelang pemilu. Program Pangaping Sora menjadi strategi utama dengan target setiap kader menjaga minimal sepuluh suara di lingkungannya secara berkelanjutan hingga 2029. Kelengkapan struktur organisasi sampai tingkat RT/RW melalui PJRW dan PJRT menjadi indikator penting keberhasilan kaderisasi.

Peningkatan Perolehan Suara di Tiap Dapil

Perolehan suara PKS Kabupaten Bandung Barat meningkat dari 126.661 suara pada Pemilu 2019 menjadi 158.710 suara pada Pemilu 2024, atau tumbuh sekitar 25,3%. Peningkatan tersebut memperkuat posisi PKS dalam perolehan kursi DPRD Kabupaten Bandung Barat periode 2024-2029. Namun, pertumbuhan suara belum merata di seluruh dapil karena distribusi kader dan tenaga pembina (murobbi) masih berbeda antarwilayah. Sejumlah dapil memiliki kader berlebih, sedangkan wilayah lain masih kekurangan. Oleh karena itu, intervensi silang berupa penempatan pembina dari wilayah yang memiliki sumber daya kader lebih besar ke wilayah yang kekurangan diperlukan untuk memperluas pemerataan dukungan.



Peningkatan Jumlah Kader

Jumlah pemegang Kartu Tanda Anggota (KTA) PKS Kabupaten Bandung Barat meningkat dari 17.537 orang pada 2019 menjadi 39.543 orang pada 2024, atau sekitar 125%. Sementara itu, jumlah kader terbina meningkat dari 2.112 menjadi 2.544 orang. Pada 2019, kader terbina terdiri atas 525 kader pelopor dan 1.587 kader pendukung, sedangkan pada 2024 jumlahnya menjadi 757 kader pelopor dan 1.787 kader pendukung. Data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan KTA disertai pertumbuhan kader terbina, meskipun dengan laju yang berbeda. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perluasan keanggotaan di Kabupaten Bandung Barat relatif diikuti penguatan pembinaan kader.

Pengaruh Sistem Sainte-Laguë terhadap Peningkatan Kursi

Peningkatan suara PKS sebesar 25,3% didukung oleh perluasan struktur partai hingga tingkat RT/RW dan penguatan basis dukungan di wilayah pemilihan. Dalam sistem Sainte-Laguë, suara partai dibagi menggunakan bilangan ganjil berurutan, sehingga kemampuan mempertahankan hasil pembagian suara yang kompetitif menjadi penting dalam memperoleh kursi. Pertumbuhan suara PKS yang disertai perluasan jaringan kader membantu memperkuat daya saing perolehan kursi. Meskipun demikian, keberhasilan agregat tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kekuatan di seluruh dapil karena distribusi kader masih belum seimbang.

Tipologi Masyarakat sebagai Pemilih

Masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang masih memiliki karakter sosial perdesaan cenderung merespons pendekatan langsung, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan kedekatan dengan tokoh lokal. Kehadiran kader di lingkungan masyarakat berperan dalam membangun kepercayaan dan dukungan politik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa RW yang pernah dikunjungi kader memperoleh suara rata-rata di atas 20 suara per RW, lebih tinggi dibandingkan wilayah yang belum tersentuh kader. Temuan ini memperlihatkan pentingnya interaksi langsung dan hubungan sosial dalam mengubah aktivitas kader menjadi dukungan elektoral.

Pengaruh Peningkatan Jumlah DPT 2019-2024

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bandung Barat meningkat dari 1.180.111 pemilih pada 2019 menjadi 1.309.568 pemilih pada 2024, atau sekitar 10,97%. Pertumbuhan pemilih tersebut berlangsung bersamaan dengan perluasan struktur UPA hingga tingkat RT/RW. Pendekatan langsung yang dilakukan kader membantu PKS menjangkau pemilih lama maupun pemilih baru, sehingga pertumbuhan DPT di wilayah ini diikuti peningkatan perolehan suara partai. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan pemilih dapat menjadi peluang elektoral apabila didukung jaringan kader yang aktif dan menjangkau masyarakat secara luas.

Pengaruh Siraman Rupiah (Money Politics)

Politik uang tetap menjadi tantangan bagi PKS Kabupaten Bandung Barat, meskipun dampaknya dinilai relatif lebih dapat diredam dibandingkan wilayah penelitian lainnya. Pragmatisme pemilih, pengalaman politik masa lalu, dan gesekan internal antarpengukung calon legislatif masih memengaruhi dinamika kemenangan. Namun, hubungan kekeluargaan dan ketokohan lokal yang kuat membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kader. Kendala utama lainnya adalah keterbatasan anggaran operasional dalam menghadapi kompetitor yang memiliki modal lebih besar. Dengan demikian, penguatan hubungan sosial dan konsolidasi internal menjadi penting untuk mempertahankan dukungan di tengah persaingan politik.



Hasil Penelitian DPD PKS Kota Cimahi

Sintesis Hasil Wawancara Ketua DPD, Ketua BKAP, dan Ketua BP3

Hasil wawancara dengan Reza Mahdi, Iwan Hendrawan, dan Angi Permana menunjukkan bahwa PKS Kota Cimahi mengalami peningkatan kaderisasi yang sangat besar. Jumlah pemegang KTA meningkat dari sekitar 3.000 menjadi 7.000 orang, kemudian mencapai sekitar 25.000 orang dalam basis data partai, meskipun target awal berikutnya ditetapkan sebesar 13.000 orang. Evaluasi dilakukan setiap enam bulan melalui survei elektabilitas. Dari lebih dari 20.000 anggota baru ber-KTA, sekitar 1.000 orang meningkat ke jenjang kader terbina. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah anggota belum sepenuhnya diikuti pembinaan secara mendalam. Ketiga narasumber menegaskan bahwa kader menjadi ujung tombak pemenangan karena keterbatasan modal dan akses media massa yang dimiliki partai.

Peningkatan Perolehan Suara di Tiap Dapil

Perolehan suara PKS Kota Cimahi meningkat dari 53.909 suara pada Pemilu 2019 menjadi 70.988 suara pada Pemilu 2024, atau tumbuh sekitar 31,7%. Peningkatan tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi di antara empat wilayah penelitian dan diikuti kenaikan kursi DPRD dari tujuh menjadi sembilan kursi. Hasil ini menunjukkan hubungan positif antara pertumbuhan suara dan perolehan kursi. Namun, kekuatan elektoral masih berbeda antarwilayah. Wilayah dengan kader aktif cenderung memperoleh dukungan lebih besar dibandingkan wilayah yang memiliki kepadatan kader rendah, seperti Karang Mekar. Dengan demikian, pemerataan kader tetap diperlukan untuk memperkuat capaian di seluruh dapil.

Peningkatan Jumlah Kader

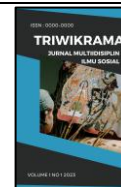
Jumlah kader berdasarkan data jenjang kader meningkat dari 6.119 orang pada 2019 menjadi 24.337 orang pada 2024, atau hampir 298%. Namun, peningkatan tersebut didominasi kader jenjang pemula, yang bertambah dari 4.656 menjadi 23.435 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa ekspansi kaderisasi lebih banyak bertumpu pada rekrutmen anggota baru daripada pematangan jenjang kader. Tidak semua pemegang KTA memiliki kesadaran untuk terlibat aktif dalam organisasi; sebagian di antaranya didorong oleh kepentingan memperoleh bantuan sosial, seperti program KIP/PIP. Oleh karena itu, peningkatan jumlah anggota perlu diimbangi pembinaan agar keanggotaan administratif berkembang menjadi kader yang aktif dan memiliki komitmen organisasi.

Pengaruh Sistem Sainte-Laguë terhadap Peningkatan Kursi

Karakteristik Kota Cimahi yang relatif kompak secara geografis mendukung konsentrasi suara PKS di sejumlah dapil. Dalam sistem Sainte-Laguë, konsentrasi dukungan tersebut membantu mempertahankan hasil pembagian suara agar tetap kompetitif dibandingkan partai lain. Pertumbuhan suara sebesar 31,7% dapat dikonversi menjadi dua tambahan kursi DPRD. Hasil ini memperlihatkan bahwa peningkatan suara yang disertai penyebaran dukungan di berbagai wilayah dapat meningkatkan efektivitas konversi suara menjadi kursi. Meskipun demikian, perbedaan kekuatan kader antarkelurahan masih perlu diperhatikan dalam strategi pemenangan berikutnya.

Tipologi Masyarakat sebagai Pemilih

Masyarakat Kota Cimahi terdiri atas keluarga muda, pegawai swasta, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta komunitas militer yang cukup kuat. Dibandingkan dengan Kota Bandung, hubungan



sosial dan interpersonal masyarakat Cimahi cenderung lebih erat. Kondisi ini memberikan peluang bagi kader dan calon legislatif untuk membangun dukungan melalui kedekatan personal serta aktivitas sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, keterlibatan kader dalam lingkungan warga menjadi sarana penting untuk membangun kepercayaan dan mempertahankan dukungan politik secara berkelanjutan.

Pengaruh Peningkatan Jumlah DPT 2019-2024

DPT Kota Cimahi meningkat dari 379.484 pemilih pada 2019 menjadi 419.974 pemilih pada 2024, atau sekitar 10,67%. Pertumbuhan tersebut diikuti peningkatan suara PKS yang lebih tinggi secara proporsional, yaitu 31,7%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kaderisasi dan strategi pendekatan masyarakat berpotensi membantu partai menjangkau pemilih lama sekaligus pemilih baru. Berbeda dengan Kabupaten Bandung yang mengalami peningkatan DPT tetapi penurunan suara, Kota Cimahi menunjukkan bahwa pertumbuhan pemilih dapat menjadi peluang elektoral apabila didukung mobilisasi kader yang efektif.

Pengaruh Siraman Rupiah (Money Politics)

Politik uang menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perilaku memilih di Kota Cimahi. Ketua BP3 memperkirakan kontribusinya sekitar 30% terhadap penentuan suara di luar faktor kader. Meskipun demikian, penyebaran kader dan jaringan sosial berbasis kekerabatan serta komunitas keagamaan dinilai mampu mengimbangi tekanan insentif material. Pertumbuhan suara PKS yang tinggi menunjukkan pentingnya aktivitas kader dalam mempertahankan hubungan dengan masyarakat. Namun, praktik politik uang tetap menjadi tantangan yang memerlukan penguatan komunikasi politik, konsolidasi jaringan sosial, dan pendekatan berkelanjutan kepada pemilih.

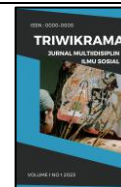
Hasil Penelitian DPD PKS Kabupaten Bandung

Sintesis Hasil Wawancara Ketua DPD, Ketua BKAP, dan Ketua BP3

Hasil wawancara dengan Agus Setiawan, Asep Ramdhan, dan Yudi Kusnandar menunjukkan bahwa peningkatan jumlah anggota PKS Kabupaten Bandung belum sepenuhnya berkontribusi terhadap kenaikan suara. Program KTA-isasi berhasil menjangkau sekitar 40.000 anggota, tetapi distribusi kader belum merata. Dapil 3 memiliki basis kader yang kuat, sedangkan wilayah Pacira, yang meliputi Pasirjambu, Ciwidey, dan Rancabali, masih kekurangan kader. Dari keseluruhan anggota ber-KTA, sekitar 5.000 orang aktif mengikuti pembinaan pekanan melalui UPA. Strategi pemenangan dilakukan melalui pemetaan TPS berdasarkan kategori menang, menengah, dan nol, serta perekrutan calon legislatif eksternal untuk menjangkau wilayah yang belum memiliki struktur kader memadai.

Penurunan Perolehan Suara di Tiap Dapil

Berbeda dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi, perolehan suara PKS Kabupaten Bandung menurun dari 273.111 suara pada Pemilu 2019 menjadi 254.887 suara pada Pemilu 2024, atau sekitar 6,7%. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah anggota tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan dukungan elektoral. Ketimpangan distribusi kader antardapil menjadi salah satu faktor yang memengaruhi hasil tersebut. Kekuatan kader yang terkonsentrasi di wilayah tertentu belum mampu mengimbangi kelemahan di wilayah lain, terutama pada daerah yang luas dan memiliki karakteristik masyarakat beragam.



Peningkatan Jumlah Kader

Jumlah kader terbina PKS Kabupaten Bandung meningkat dari 2.851 orang pada 2019 menjadi 3.880 orang pada 2024, atau sekitar 36,1%. Pada 2024, jumlah tersebut terdiri atas 1.139 kader pelopor, 1.163 kader pratama, dan 1.578 kader muda. Namun, jika dibandingkan dengan basis keanggotaan yang mendekati 40.000 pemegang KTA, kader terbina hanya mencakup sekitar 9,7%. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggota belum mengikuti pembinaan secara intensif. Akibatnya, pertumbuhan jumlah anggota belum dapat diterjemahkan secara optimal menjadi dukungan elektoral, terutama ketika kader aktif masih terkonsentrasi di wilayah tertentu.

Pengaruh Sistem Sainte-Laguë terhadap Perolehan Kursi

Penurunan suara PKS Kabupaten Bandung memperkecil hasil pembagian suara dalam sistem Sainte-Laguë dan mengurangi peluang memperoleh kursi dibandingkan partai pesaing yang mengalami pertumbuhan suara. Berbeda dengan Kota Bandung, perubahan hasil elektoral di Kabupaten Bandung tidak dikaitkan dengan perubahan jumlah dapil, tetapi terutama dengan penurunan suara dan ketimpangan dukungan antardaerah pemilihan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan konversi suara menjadi kursi sangat bergantung pada kemampuan partai mempertahankan dan memperluas dukungan di setiap dapil.

Tipologi Masyarakat sebagai Pemilih

Kabupaten Bandung memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen, mencakup kawasan perkotaan, semi-perkotaan, industri, dan perdesaan. Dalam kondisi tersebut, figur calon legislatif sering kali memiliki pengaruh besar terhadap perilaku memilih. Tokoh agama, kepala desa, mantan pejabat daerah, pengusaha lokal, dan tokoh komunitas dapat memobilisasi dukungan melalui jaringan sosial yang telah terbentuk di masyarakat. Oleh karena itu, penguatan struktur kader perlu disertai pemilihan calon legislatif yang memiliki ketokohan dan kedekatan dengan masyarakat setempat agar dukungan partai dapat dipertahankan.

Pengaruh Peningkatan Jumlah DPT 2019-2024

DPT Kabupaten Bandung meningkat dari 2.356.412 pemilih pada 2019 menjadi 2.664.172 pemilih pada 2024, atau sekitar 13,06%. Pertumbuhan ini merupakan yang terbesar di antara empat wilayah penelitian. Namun, peningkatan jumlah pemilih justru diikuti penurunan suara PKS. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan DPT tidak otomatis menjadi peluang yang berhasil dimanfaatkan partai. Pemilih baru belum sepenuhnya terjangkau oleh jaringan kader PKS dan berpotensi memberikan dukungan kepada kompetitor melalui pendekatan figur lokal maupun insentif material.

Pengaruh Caleg Eksternal (Tokoh Non-Kader) terhadap Kooptasi Suara Basis Internal

Perekrutan calon legislatif eksternal dilakukan untuk memperluas jangkauan partai, terutama di wilayah yang memiliki struktur kader terbatas. Namun, strategi ini juga menimbulkan persoalan internal ketika calon legislatif dari luar sistem pembinaan mengambil basis suara yang sebelumnya dibangun kader partai. Kondisi tersebut dapat menimbulkan gesekan, melemahkan loyalitas, dan mengurangi efektivitas kerja kader. Fenomena ini memperlihatkan dilema partai kader: perluasan dukungan melalui tokoh eksternal dapat membuka akses kepada pemilih baru, tetapi berisiko mengganggu soliditas kader internal apabila tidak disertai koordinasi dan pembagian peran yang jelas.



Pengaruh Siraman Rupiah (Money Politics)

Politik uang menjadi salah satu faktor eksternal yang memengaruhi penurunan suara PKS Kabupaten Bandung pada Pemilu 2024. Praktik tersebut diperkuat oleh strategi kompetitor yang berupaya merebut basis suara pada akhir masa kampanye. Luasnya wilayah, keterbatasan pengawasan, pragmatisme pemilih, serta kondisi ekonomi masyarakat di sejumlah kecamatan meningkatkan kerentanan terhadap insentif material. Oleh karena itu, penurunan suara tidak dapat dijelaskan hanya melalui persoalan kaderisasi, tetapi juga perlu mempertimbangkan persaingan politik dan kemampuan partai mempertahankan dukungan masyarakat di tengah praktik politik uang.

Hasil Penelitian DPD PKS Kota Bandung

Sintesis Hasil Wawancara Ketua DPD, Ketua BKAP, dan Ketua BP3

Hasil wawancara dengan Susanto Triyogo Adiputro, Kodiron, dan Pujo Raharjo menunjukkan bahwa PKS Kota Bandung berhasil mencapai rekrutmen KTA dalam jumlah besar, yaitu antara 78.000 hingga 83.092 anggota, jauh melampaui target awal sebanyak 40.000 anggota. Namun, jumlah kader penggerak aktif hanya sekitar 6.000 orang, sedangkan kader terbina berdasarkan dokumentasi berjumlah 3.920 orang atau sekitar 4,71% dari total KTA. Strategi kemenangan dilakukan melalui pendekatan langsung (direct selling), mobilisasi pasukan Ranger, dan perekrutan 7.424 saksi TPS. Meskipun demikian, peningkatan jumlah KTA hanya diikuti kenaikan sekitar 2.500 suara. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ekspansi keanggotaan secara kuantitatif dan pembentukan kader yang aktif serta efektif dalam kemenangan.

Dinamika Perolehan Suara di Tiap Dapil

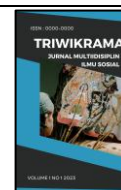
Perolehan suara PKS Kota Bandung meningkat tipis dari 295.615 suara pada Pemilu 2019 menjadi 297.937 suara pada Pemilu 2024, atau sekitar 0,8%. Namun, jumlah kursi DPRD yang diperoleh justru turun dari 13 menjadi 11 kursi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kenaikan suara tidak selalu menghasilkan peningkatan kursi. Perubahan konfigurasi daerah pemilihan dan mekanisme konversi suara melalui Sainte-Laguë menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam menjelaskan penurunan kursi tersebut.

Peningkatan Jumlah Kader

Dari target 40.000 KTA, PKS Kota Bandung berhasil memperoleh 83.092 KTA atau sekitar 208% dari target. Namun, jumlah kader terbina hanya mencapai 3.920 orang atau sekitar 4,71% dari total KTA. Data tersebut menunjukkan bahwa strategi KTA-isasi lebih berhasil memperluas keanggotaan administratif daripada meningkatkan jumlah kader yang menjalani pembinaan secara intensif. Kondisi ini menjadi tantangan bagi organisasi karena besarnya basis anggota belum sepenuhnya diikuti penguatan militansi dan keterlibatan elektoral. Oleh karena itu, pembinaan pascarekrutmen, termasuk penguatan aspek spiritual (ruhiyah), menjadi penting untuk mengatasi kejenuhan kader dan meningkatkan kualitas keterlibatan mereka dalam kegiatan organisasi.

Pengaruh Sistem Sainte-Laguë terhadap Penurunan Kursi

Penurunan kursi PKS Kota Bandung berkaitan dengan kenaikan suara yang relatif kecil dan perubahan pembagian daerah pemilihan dari enam menjadi tujuh dapil. Dalam sistem Sainte-Laguë, perolehan kursi ditentukan oleh perbandingan hasil pembagian suara setiap partai pada masing-masing dapil. Perubahan konfigurasi wilayah menyebabkan basis suara yang sebelumnya terkonsentrasi dalam dapil lama harus diperhitungkan kembali dalam struktur dapil baru. Akibatnya, tambahan suara PKS belum cukup meningkatkan daya saing hasil pembagian suara di sejumlah dapil untuk mempertahankan seluruh kursi sebelumnya. Dengan demikian, penurunan



kursi perlu dipahami melalui kombinasi keterbatasan pertumbuhan suara, distribusi dukungan antardapil, dan perubahan struktur daerah pemilihan.

Tipologi Masyarakat sebagai Pemilih

Kota Bandung memiliki karakteristik pemilih yang heterogen, rasional, dan kritis terhadap isu publik, seperti tata kota, transportasi, ekonomi kreatif, pendidikan, dan pelayanan publik. Basis dukungan PKS mencakup kelas menengah perkotaan, komunitas pendidikan, jaringan masjid, dan kelompok profesional muda. Dalam konteks ini, penambahan anggota melalui KTA-isasi tidak secara otomatis menghasilkan tambahan suara karena masyarakat perkotaan juga mempertimbangkan rekam jejak, program, dan kinerja nyata partai. Hal ini sejalan dengan kerangka V.O. Key Jr. mengenai tiga dimensi partai, khususnya hubungan antara organisasi partai (Party as Organization) dan kinerja partai dalam pemerintahan (Party in Government). Dengan demikian, penguatan organisasi perlu diikuti bukti kinerja dan program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Pengaruh Peningkatan Jumlah DPT 2019-2024

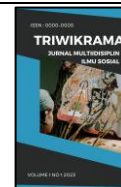
DPT Kota Bandung meningkat dari 1.739.213 pemilih pada 2019 menjadi 1.887.881 pemilih pada 2024, atau sekitar 8,55%. Pertumbuhan tersebut merupakan yang terendah di antara empat wilayah penelitian. Kondisi ini menunjukkan bahwa peluang ekspansi elektoral melalui penambahan pemilih baru relatif lebih terbatas dibandingkan wilayah lain. Pertumbuhan DPT yang lebih lambat, ditambah karakteristik pemilih perkotaan yang kritis, menjadi konteks penting dalam menjelaskan mengapa kenaikan suara PKS hanya mencapai sekitar 0,8%, meskipun jumlah KTA meningkat secara signifikan.

Pengaruh Perubahan Dapil DPRD Kota Bandung (dari 6 menjadi 7 Dapil)

Perubahan daerah pemilihan DPRD Kota Bandung dari enam menjadi tujuh dapil berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2023 bertujuan mengurangi ketimpangan alokasi kursi antardapil. Jika sebelumnya rentang alokasi kursi berkisar 7-11 kursi, pada Pemilu 2024 pembagiannya menjadi lebih proporsional, yaitu 6-8 kursi per dapil. Salah satu perubahan wilayah adalah pemindahan Kecamatan Sumur Bandung dari Dapil 2 ke Dapil 1. Perubahan ini memengaruhi distribusi basis pemilih dan perhitungan peluang perolehan kursi partai. Bagi PKS, basis suara yang sebelumnya terkonsentrasi pada konfigurasi dapil lama harus menyesuaikan diri dengan pembagian wilayah baru. Oleh karena itu, penurunan kursi dari 13 menjadi 11 tidak hanya berkaitan dengan kinerja kaderisasi, tetapi juga dengan perubahan struktur dapil yang memengaruhi konversi suara menjadi kursi.

Pengaruh Siraman Rupiah (Money Politics)

Politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) diidentifikasi sebagai salah satu tantangan utama PKS Kota Bandung pada Pemilu 2024. Praktik tersebut terutama menjadi persoalan di lingkungan masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah dan tingkat pragmatisme pemilih yang tinggi. Dalam situasi ketika kenaikan suara PKS hanya sekitar 2.500 suara, politik uang dinilai mengurangi peluang partai memperoleh tambahan dukungan yang lebih besar. Bersama perubahan dapil dan terbatasnya konversi KTA menjadi kader aktif, kondisi tersebut memperlihatkan kompleksitas tantangan kemenangan PKS di wilayah perkotaan. Dengan demikian, penguatan kualitas kader perlu disertai strategi yang relevan dengan kebutuhan pemilih, pengawasan suara, dan konsolidasi organisasi.



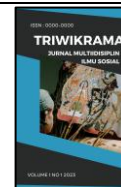
4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Studi Komparatif Kaderisasi dan Pemenangan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 pada DPD PKS se-Bandung Raya yang meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat, ditemukan bahwa efektivitas kaderisasi memiliki perbedaan di setiap wilayah meskipun seluruh DPD menerapkan Manhaj Tarbiyah dan mekanisme Pertemuan Pelaksana Unit Pembinaan Anggota (P2 UPA). Di Kabupaten Bandung Barat, pertumbuhan jumlah Kartu Tanda Anggota (KTA) relatif diikuti peningkatan kader terbina, sehingga proses kaderisasi berjalan lebih proporsional. Sebaliknya, Kota Cimahi mengalami lonjakan jumlah KTA yang belum sepenuhnya diimbangi peningkatan kader terbina, sedangkan kesenjangan tersebut lebih besar di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas kaderisasi tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan rekrutmen anggota, tetapi juga oleh kapasitas pembinaan, jumlah dan kualitas murobbi, serta kemampuan organisasi mengembangkan anggota menjadi kader yang aktif dan memiliki militansi.

Strategi pemenangan yang diterapkan setiap DPD juga menunjukkan karakteristik berbeda. Kabupaten Bandung Barat mengandalkan program Pangaping Sora dan penguatan struktur hingga tingkat RT/RW, Kota Cimahi menerapkan penyisiran wilayah serta pelibatan pejabat publik, Kabupaten Bandung menggunakan pemetaan TPS dan perekrutan calon legislatif eksternal, sedangkan Kota Bandung mengoptimalkan pendekatan langsung (direct selling) melalui pasukan Ranger dan perekrutan saksi TPS. Namun, pelaksanaan strategi tersebut menghadapi berbagai kendala, seperti ketimpangan distribusi kader, keterbatasan tenaga pembina, gesekan internal akibat perekrutan calon legislatif eksternal, praktik politik uang, serta perubahan konfigurasi daerah pemilihan. Kondisi ini menegaskan bahwa efektivitas tim pemenangan tidak hanya bergantung pada mobilisasi kader, tetapi juga pada koordinasi organisasi, kredibilitas calon legislatif, kemampuan memahami karakteristik pemilih, dan penyesuaian strategi terhadap mekanisme kelembagaan pemilu.

Hubungan antara peningkatan jumlah kader dan perolehan suara PKS pada Pemilu Legislatif 2024 terbukti bersifat kondisional dan tidak selalu linear. Di Kabupaten Bandung Barat, perolehan suara meningkat dari 126.661 menjadi 158.710 suara atau sekitar 25,3%, sedangkan di Kota Cimahi meningkat dari 53.909 menjadi 70.988 suara atau sekitar 31,7%. Sebaliknya, Kabupaten Bandung mengalami penurunan suara dari 273.111 menjadi 254.887 suara atau sekitar 6,7%, sementara Kota Bandung hanya mengalami kenaikan dari 295.615 menjadi 297.937 suara atau sekitar 0,8%, meskipun jumlah kursinya menurun dari 13 menjadi 11. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kesenjangan antara jumlah KTA dan kader terbina, pemerataan kader antardapil, karakteristik pemilih, politik uang, ketokohan calon legislatif, serta mekanisme konversi suara melalui sistem Sainte-Laguë. Khusus Kota Bandung, perubahan jumlah dapil dari enam menjadi tujuh turut memengaruhi distribusi basis suara dan peluang perolehan kursi. Dengan demikian, peningkatan jumlah kader merupakan syarat perlu, tetapi bukan syarat yang cukup bagi keberhasilan pemenangan pemilu.

Berdasarkan temuan tersebut, penguatan kaderisasi dan strategi pemenangan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pembinaan, pemerataan distribusi kader dan murobbi, serta pengembangan sistem evaluasi yang terukur. DPD PKS Kabupaten Bandung Barat perlu memperkuat pemerataan pembina antardapil dan mengembangkan program Pangaping Sora melalui pemantauan berbasis data. Kota Cimahi perlu meningkatkan jumlah dan kompetensi murobbi serta mereplikasi praktik pemenangan di wilayah yang masih memiliki kepadatan kader rendah. Kabupaten Bandung perlu memperkecil kesenjangan antara jumlah KTA dan kader terbina, memperkuat struktur di wilayah yang tertinggal, serta mengelola perekrutan calon



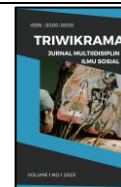
legislatif eksternal secara lebih hati-hati agar tidak menimbulkan fragmentasi basis suara internal. Sementara itu, Kota Bandung perlu meningkatkan rasio konversi KTA menjadi kader terbina, menyesuaikan strategi distribusi suara dengan perubahan dapil, memperkuat pembinaan ruhiyah, dan mengoptimalkan pendekatan digital untuk menjangkau pemilih muda serta masyarakat perkotaan yang rasional.

Selain itu, pejabat publik dari unsur PKS perlu meningkatkan kehadiran di tengah masyarakat, menyampaikan capaian kinerja legislasi, anggaran, dan pengawasan secara transparan, serta membangun komunikasi dua arah dengan konstituen dan struktur partai. Integritas, keteladanan, dan responsivitas pejabat publik menjadi modal penting dalam membangun kepercayaan masyarakat dan memperkuat hubungan antara kinerja pemerintahan dengan dukungan elektoral. Seluruh kader juga perlu menjaga konsistensi pembinaan spiritual melalui halaqah, tilawah, dan ubudiyah, memperluas keterlibatan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, menjalankan peran sebagai penggerak dan penjaga suara secara bertanggung jawab, serta menjaga ukhuwah untuk mencegah konflik internal. Regenerasi kader dan pemanfaatan media digital secara bijak juga diperlukan agar kaderisasi tetap relevan dengan perkembangan perilaku pemilih.

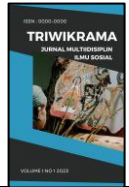
Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat relevansi teori partai kader Duverger dan teori insentif organisasi Panebianco dalam menjelaskan kesenjangan antara keanggotaan administratif dan kader terbina. Selain itu, kerangka Downs, Sartori, Norris, Cox, dan V.O. Key Jr. membantu menjelaskan variasi strategi kemenangan serta perbedaan hasil elektoral antarwilayah. Secara keseluruhan, keberhasilan kaderisasi dalam mendukung kemenangan pemilu ditentukan oleh kemampuan partai mengonversi jumlah anggota menjadi kader yang berkualitas dan militan, memeratakan struktur organisasi, menjaga soliditas internal, menghadapi tekanan politik uang, serta menyesuaikan strategi dengan karakteristik pemilih dan sistem pemilu. Konsistensi dalam memenuhi aspek-aspek tersebut menjadi dasar penting bagi penguatan kinerja organisasi dan peningkatan efektivitas kemenangan PKS pada pemilu mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G. A. (1966). *Comparative Politics: A Developmental Approach*. Little, Brown and Company.
- Aspinall, E. &. (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif*. Yogyakarta: PolGov UGM.
- Aurellia, A. (2024, Maret 7). Daftar Hasil Perolehan Kursi di DPRD Kota Bandung, PKS Mendominasi. Retrieved from Detik Jabar: <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7230220/daftar-hasil-perolehan-kursi-di-dprd-kota-bandung-pks-mendominasi>
- Bana, H. A. (2001). *Majmū'at Rasā'il al-Imām al-Shahīd Hasan al-Bannā*. Kairo: Dar al-Da'wah.
- Bandung, H. B. (2024, September 20). Sah! KPU Kota Bandung Menetapkan DPT dengan Jumlah Pemilih Sebanyak 1.887.881. Retrieved from BAWASLU Kota Bandung: <https://bandungkota.bawaslu.go.id/berita/sah-kpu-kota-bandung-menetapkan-dpt-dengan-jumlah-pemilih-sebanyak-1887881>
- Bandung, K. K. (2019). Daftar Hasil Pemilu Legislatif DPRD Kota Bandung.
- Bandung, K. K. (2019). Hasil Akhir Pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten Bandung.
- Bandung, K. K. (2024). Daftar Hasil Pemilihan Legislatif DPRD Kota Bandung.
- Bandung, K. K. (2024). Hasil Akhir Pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten Bandung.



- Bandung, K. K. (2024). Jumlah DPT Pemilu Legislatif 2024. Bandung.
- Bandung, K. K. (n.d.). DPT PILEG 2024. Kabupaten Bandung.
- Barat, K. K. (2019). Hasil Total Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Bandung Barat.
- Barat, K. K. (2024). Hasil Total Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Bandung Barat.
- Barat, K. K. (2024). Jumlah DPT PILEG 2024. Kabupaten Bandung Barat.
- Belitung, H. J. (2017). Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Retrieved from JDIH Provinsi Bangka Belitung: <https://jdih.babelprov.go.id/sites/default/files/produk-hukum/UU%20No.%207%20Tahun%202017%20Hal%201-150.pdf>
- BOGIARTO, W. (2024, Februari 16). *Real Count* DPRD Jabar, Gerindra-PKS-Golkar Unggul Sementara. Retrieved from RMOL.ID: <https://rmol.id/politik/read/2024/02/16/609668/real-count-dprd-jabar-gerindra-pks-golkar-unggul-sementara>
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar - Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Cimahi, K. K. (2019). Hasil Pemilihan DPRD Kota Cimahi.
- Cimahi, K. K. (2024). Hasil Pemilihan Legislatif DPRD Kota Cimahi.
- Cimahi, K. K. (2024). Jumlah DPT 2024. Cimahi.
- Cox, G. W. (1997). *Making Votes Count: Strategic Coordination in the World's Electoral Systems*. Cambridge University Press.
- Downs, A. (1957). *An Economic Theory of Democracy*. Harper & Row.
- Duverger, M. (1954). *Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State*. London: Methuen.
- Duverger, M. (1963). *Political Parties*. Wiley.
- Hasan, N. (2010). *Islam Politik di Dunia Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.
- Indonesia, H. M. (2024, Februari 29). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Retrieved from MK.RI: <https://www.mkri.id>
- JR., V. K. (1966). *Voting Behavior*.
- Kartono, K. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- KPU KABAUPATEN BANDUNG BARAT. (2024, MEI 29). KPU KBB Resmi Tetapkan Kursi di DPRD Hasil Pemilu 2024. Retrieved from KPU KAB BANDUNG BARAT: <https://kab-bandungbarat.kpu.go.id/blog/read/kpu-kbb-resmi-tetapkan-kursi-di-dprd-hasil-pemilu-2024>
- KPURI, J. (2023). PKPU No 6 Tahun 2023. Retrieved from jdih.kpu.go.id:peraturan.bpk.go.id/Details/249175/peraturan-kpu-no-6-tahun-2023
- Mair, P. (1997). *Party System Change: Approaches and Interpretations*. Clarendon Press.
- Michels, R. (1911). *Iron Law of Oligarchy*.
- Norris, P. (2000). *Political Campaigns*. Oxford University Press.
- Panbianco, A. (1988). *Organizational Theory of Political Practice*.
- Pradana, W. (2024, Mei 2). PKS 'Rajai' Perolehan Kursi DPRD Kota Cimahi 2024-2029. Retrieved from Detik Jabar: <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7321966/pks-rajai-perolehan-kursi-dprd-kota-cimahi-2024-2029>
- Randall, V. &. (2002). *Party Institutionalization*.
- Randall, V. &. (2002). Party Institutionalization in New Democracies. *Party Politics Journal*.
- Saptohutomo, A. P. (2024, Februari 23). Pemilu 2024 Sirekap Pileg 2024 KPU Data 62,09 Persen: PDI-P 16,78 Persen, Golkar 15,13 Persen. Retrieved from Kompas.Com: <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/23/06541041/sirekap-pileg-2024-kpu-data-6209-persen-pdi-p-1678-persen-golkar-1513-persen?>



- Sartori, G. (1976). *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*. Cambridge University Press.
- Tito. (2024, Februari 19). *Real Qount Sementara KPU, PKS dan Golkar Bersaing Ketat Jadi Pemenang di Pileg KBB*. Retrieved from BandungKita.id: <https://bandungkita.id/2024/02/19/real-qount-sementara-kpu-pks-dan-golkar-bersaing-ketat-di-pileg-kbb>
- Verba, S., Scholzman, K. L., & Brady, H. (1995). *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Harvard University Press.